LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2019

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

KECAMATAN MERGANGSAN

Jln. Sisingamangaraja No. 55 Yogyakarta 55153

No Telepon/Faximili (0274) 388195

mg@jogjakota.go.id

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Mergangsan Tahun 2019 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. LKIP Tahun 2019 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, 31 Januari 2019
Camat Mergangsan

Rini Rahmawati, S.IP, M.IP
NIP. 19670213 199603 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

IKHTISAR EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL v

DAFTAR BAGAN/GRAFIK vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Struktur Organisasi 1

1.2 Fungsi dan Tugas 2

1.3 Isu-Isu Strategis 3

1.4 Keadaan Pegawai 8

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana 10

1.6 Keuangan 10

1.7 Sistematika LKIP 11

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 13

2.1 Perencanaan Strategis 13

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah 13

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 15

2.1.3 Strategi dan Program Kegiatan 16

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 18

2.3 Rencana AnggaranTahun 2019 19

2.3.1 Target Belanja PD Kecamatan Mergangsan 19

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis 19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 20

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2019 20

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 21

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya 30

3.4. Akuntabilitas Anggaran 35

3.5. Inovasi 37

BAB V PENUTUP 38

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan, Golongan dan Jenis Kelamin 8

Tabel 1.2 Jumlah pegawai berdasarkan jenis Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 9

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin 9

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon 10

Tabel 2.1 Visi dan Misi Kepala Daerah 14

Tabel 2.2 Sasaran Strategis PD Kecamatan Mergangsan 16

Tabel 2.3 Sasaran, Program dan Kegiatan 17

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja (Murni) 18

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja (Perubahan) 18

Tabel 2.6 Target Belanja APBD Perubahan 19

Tabel 2.7 Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis 19

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama PD Kecamatan Mergangsan 20

Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja 20

Tabel 3.3 Data Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial Kota Yogyakarta 2018 21

Tabel 3.4 Data Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial Kota Yogyakarta 2017 22

Tabel 3.5 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 24

Tabel 3.6 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Program 25

Tabel 3.7 Data Prosentase Swadaya Masyarakat pada Dana PMK Tahun 2019 26

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun-tahun sebelumnya 27

Tabel 3.9 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan 27

Tabel 3.10 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 28

Tabel 3.11 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Program 28

Tabel 3.12 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Sasaran 29

Tabel 3.13 Perbandingan Capaian Indikator Program dengan Target Renstra 29

Tabel 3.14 Analisis Efisiensi 32

Tabel 3.15 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Sasaran Tahun 2019 36

DAFTAR BAGAN/GRAFIK

Bagan I.1 Struktur Oraganisasi Perangkat Daerah Kecamatan ……. 1

Grafik I.2 Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan …….. 9

BAB 1
PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (PD) Kecamatan Mergangsan Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mergangsan Tahun 2019 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Mergangsan.
2. Mendorong Kecamatan Mergangsan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Mergangsan untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Mergangsan di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi

Kecamatan Mergangsan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Kecamatan Mergangsan merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan struktur organisasi sebagai berikut :

Bagan 1.1

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan

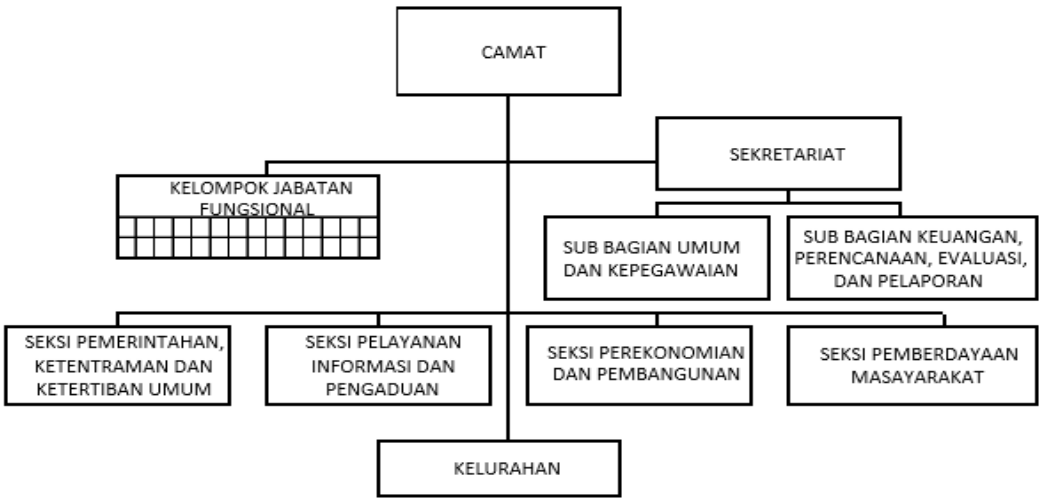

1.2 Fungsi dan Tugas

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2019 Tanggal 19 Februari 2019 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta menetapkan bahwa Kecamatan Mergangsan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan di wilayah masing-masing.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kecamatan Mergangsan mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
b. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
d. Penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
g. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
h. Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
i. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan kecamatan.

Selain peraturan diatas kecamatan di Pemerintah Kota Yogyakara di dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi juga mendasar pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah.

Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan dari walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Walikota Yogyakarta melimpahkan sebagian kewenangan kepada camat dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan, sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Umum;
2. Urusan Pendidikan;
3. Urusan Kesehatan;
4. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
6. Urusan Sosial;
7. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Urusan Lingkungan Hidup;
9. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. Urusan Kebudayaan;
11. Urusan Perdagangan;
12. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
13. Pembinaan dan Pengawasan

    13 urusan pelimpahan kewenangan dimaksud dijabarkan pada 42 kegiatan perzinan dan non perizinan menjadi tugas dan tanggung jawab kecamatan dan kelurahan di Kota Yogyakarta.

1.3 Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan, mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Kecamatan Mergangsan, antara lain sebagai berikut :

a. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain :

b. Kepentingan umum;
c. Kepastian hukum;
d. Kesamaan hak;
e. Keseimbangan hak dan kewajiban;

f. Profesional;
g. Partisipatif;
h. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
i. Keterbukaan;
j. Akuntabilitas;
k. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
l. Ketepatan waktu;
m. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta telah melaksanakan PATEN sejak Tanggal 12 Desember 2012. PATEN itulah perwujudan tekat Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang penyusunannya internal dan Standar Pelayanan Publik (SPP) di kecamatan yang penyusunanannya melibatkan unsur masyarakat.

Selain itu SPP juga telah disusun pada tingkat kelurahan di wilayah Kecamatan Mergangsan pada Tahun 2015 yaitu Kelurahan Keparakan, Kelurahan Brontokusuman dan Kelurahan Wirogunan. SPP kelurahan tersebut juga disusun dengan melibatkan tokoh masyarakat melalui FGD beberapa kali. Sebuah upaya penyusunan SPP dengan melibatkan masyarakat di tingkat kelurahan baru satu-satunya di Kota Yogyakarta atau mungkin di Indonesia pada saat itu. Kemudian pada tahun 2016 SPP kelurahan disusun untuk seluruh kelurahan di Kota Yogyakarta yang difasilitasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

Selain itu untuk memperoleh masukan dalam hal pelayanan publik, Kecamatan Mergangsan telah membentuk Forum Komunikasi Publik (FKP) yang bertujuan untuk membahasa tema tertentu dalam pelayanan kepada masyarakat serta memperoleh masukan untuk upaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Komunikasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Selain itu juga telah dikeluarkan Peraturan Walikota

Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Kecamatan Mergangsan selaku salah satu penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 yaitu persyaratan subtantif, administratif dan teknis. Secara subtantif kecamatan telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 tahun 2019 di bidang perizinan dan non perizinan. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan didukung pula oleh SPP pada tingkat kelurahan. Selanjutnya persyaratan teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan pegawai pada seksi pelayanan, informasi dan pengaduan kecamatan.

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka kecamatan harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh kecamatan maupun kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2019 telah dilakukan perbaikan sarana dan prasarana kerja antara lain perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, perbaikan gedung kantor meliputi Kantor Kecamatan Mergangsan, Kantor kelurahan Keparakan dan Kantor Kelurahan Wirogunan. Pemeliharaan gedung kantor yang mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat meliputi pembuatan jalan khusus lansia sehingga menjadi ramah lansia dan difable. Selain itu juga perbaikan tempat parkir bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Kelurahan Keparakan.

Kondisi lain yang sudah diwujudkan sebelumnya terkait dengan fasilitas pelayanan adalah ruang pelayanan yang nyaman, ber AC, ruang laktasi, tersedia TV, Surat kabar dan minuman/air mineral dan makanan kecil untuk warga yang membutuhkan pelayanan.

Tahun 2019 Kantor Kelurahan Brontokusuman diberi lahan baru oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memindahkan Kantor Kelurahan Brontokusuman yang sudah layak dengan dibangunnya kantor kelurahan yang baru diharapkan awal Tahun 2020 sudah bisa menempati kantor yang baru. Dengan harapan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal dan meningkat.

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Sesuai dengan Permendagri Nomer 130 Tahun 2018 bahwasanya kelurahan se Kota Yogyakarta mulai Tahun 2019 mendapatkan DAU tambahan sebesar Rp. 352.000.000,- yang peruntukannya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat baik fisik dan non fisik. Didalam perencanaan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh kecamatan/kelurahan merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan perangkat daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses musyawarah pembangunan (Musrenbang) jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada undang-undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia dan warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta sehingga kecamatan bersifat fasilitasi.

Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh seksi pemerintahan dan ketertiban dan ketentraman umum, seksi pemberdayaan masyarakat dan seksi perekonomian dan pembangunan serta kelurahan di wilayah Kecamatan Mergangsan yang terdiri dari tiga kelurahan yaitu Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Keparakan dan Kelurahan Wirogunan. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kecamatan dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksananya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

c. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

d. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap perangkat daerah. Output dari program yang dilakukan oleh perangkat daerah kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender (pengarusutamaan gender) dimulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Mergangsan. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta kepada camat.

e. Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaanya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Sebagian informasi publik tidak dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah

informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik sebagaimana informasi yang lainnya.

Penerapan keterbukaan publik yang sudah dilakukan di Kecamatan Mergangsan adalah pengelolaan web kecamatan dengan alamat mergangsankec@jogjakota.go.id yang berisi informasi kinerja Kecamatan Mergangsan keseluruhan yaitu SDM, jumlah anggaran yang dikelola, program dan kegiatan yang dilaksanakan, perjanjian kinerja, laporan-laporan dan dokumentasi, yang semua nya selalu diperbarui. Pada Tahun 2018 Kecamatan Mergangsan memperoleh peringkat III Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik antar kecamatan se DIY.

1.4 Keadaan Pegawai

Sumber Daya Manusia Kecamatan Mergangsan

PNS : 30 orang

Naban : 2 orang

Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan, Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

NO	Uraian	Laki-laki	Perempuan		Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1.	Camat	-	1		-	-	1	1
2.	Sekretaris kecamatan	-	1		-	-	1	1
3.	Kasi kecamatan	2	2		-	4	-	4
4.	Kasubag	-	2		-	2	-	2
5.	JFU	3	4		3	4	-	7
6.	Naban Kecamatan	2	-		-	-	-	2
7.	Lurah	1	2		-	3	-	3
8.	Seklur	-	3		-	3	-	3
9.	Kasi Kelurahan	5	4		-	9	-	9
10.	Naban kelurahan	-	-		-	-	-	-
	Jumlah	13	19		3	25	2	32

Selanjutnya kualitas sumber daya manusia terutama para pejabat struktural diukur dari pendidikan penjenjangan yang diikuti adalah sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	Diklatpim III	2	-	2
2	Diklatpim IV	21	8	13
3	Struktural yang Belum diklat penjenjangan	-	-	-

Selain dari pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang telah diikuti maka secara umum tingkat pendidikan dari para pegawai dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Bagan/Grafik 1.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

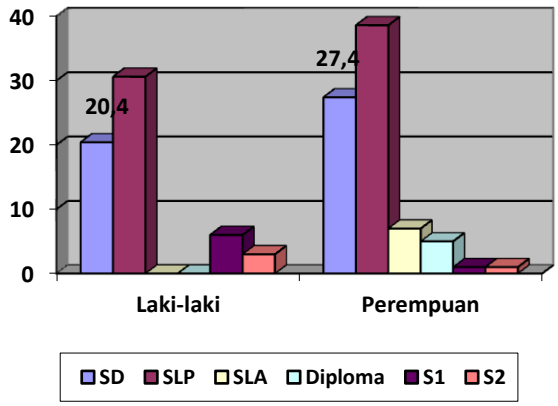

Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pada pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	S2	3	-	3
2	S1	15	5	10
3	D III	4	-	4
4	SLTA	10	7	3
5	SLTP	-	-	-
6.	SD	-	-	-
	Jumlah	32	12	20

Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan eselonering adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4

Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	III A	1	-	1
2	III B	1	-	1
3	IV A	6	3	3
4	IV B	14	5	9

Jumlah ideal pegawai Kecamatan Mergangsan dibandingkan dengan analisis jabatan dan diukur dengan analisa beban kerja yang ada masih sangat kurang karena hanya terisi 50% dari hasil analisis jabatan Tahun 2019. (Terlampir)

Struktur Organisasi Kecamatan Mergangsan (Terlampir)

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

a. Jumlah dan kondisi riil Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana Kecamatan Mergangsan sudah terpenuhi sejak OPD diperkenankan untuk memenuhi sarana dan prasarana masing-masing. OPD diperkenankan memenuhi sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta. Sarana dan prasarana OPD menjadi aset OPD dan harus masuk dalam barang inventarisasi. OPD belum diperkenankan untuk pengadaan kendaraan dan air conditioner (AC) karena masih menjadi kewenangan Bidang Aset BPKAD Kota Yogyakarta.

b. Jumlah ideal Sarana dan Prasarana dibandingkan dengan beban pekerjaan

Sarana dan prasarana yang dirasa masih kurang adalah kendaraan dinas untuk struktural kelurahan dan pengadaan AC agar diserahkan pengadaan di masing-masing OPD.

1.6 Keuangan

Dukungan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Mergangsan pada Tahun 2019 berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Pada Tahun Anggaran 2019 Kecamatan Mergangsan mengelola anggaran belanja langsung sebesar Rp. 6.088.420.354,- dengan perincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.967.332.354,- dan belanja langsung sebesar Rp. 4.121.088.000,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program dan kegiatan pendukung.

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat :

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKIP atau manfaat LKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Mergangsan, Potensi yang menjadi ruang lingkup Kecamatan Mergangsan dan sistematika penulisan LKIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi kepada daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan atau kegagalan dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan atau kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB 2
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2019, Kecamatan Mergangsan menyusun Review Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Mergangsan Tahun 2017-2022. Renstra Kecamatan Mergangsan merupakan manifestasi komitmen Kecamatan Mergangsan dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Kecamatan Mergangsan Tahun 2017-2022 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2012-2017).

RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Mergangsan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Kecamatan Mergangsan Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Pemerintah daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alur *cascade* RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Visi dan Misi Kepala Daerah

Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni Dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan	1. Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat	1. Kemiskinan Masyarakat Menurun
		2. Keberdayaan Masyarakat Meningkat
		3. Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat
	2. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Kota Yogyakarta	1. Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun
		2. Pertumbuhan Ekonomi Meningkat
	3. Memperkuat Moral, Etika dan Budaya Masyarakat Kota Yogyakarta	1. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyakarat menurun
	4. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya	1. Kualitas pendidikan meningkat
		2. Harapan hidup masyarakat meningkat
		3. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
	5. Memperkuat Tata Kota dan Kelestarian Lingkungan	1. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat
		2. Kualitas lingkungan hidup meningkat
	6. Membangun Sarana dan Prasarana Publik dan Permukiman	1. Infrastruktur wilayah meningkat
	7. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik dan Bersih	1. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

(Sumber : RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022)

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Kecamatan Mergangsan mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu :

1. Kemiskinan masyarakat menurun, dengan indikator capaian sasaran : Angka kemiskinan.
2. Keberdayaan Masyarakat Meningkat, dengan indikator capaian sasaran : Angka kemiskinan menurun.

3. Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat, dengan indikator capaian sasaran : Pola pangan harapan.
4. Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun, dengan indikator capaian sasaran : Indeks ketimpangan pendapatan.
5. Pertumbuhan Ekonomi Meningkat, dengan indikator capaian sasaran : Angka pertumbuhan ekonomi.
6. Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menurun, dengan indikator capaian sasaran : Angka kriminalitas, Jumlah pelanggaran Perda.
7. Kualitas Pendidikan Meningkat, dengan indikator capaian sasaran : Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah.
8. Harapan Hidup Masyarakat Meningka,t dengan indikator capaian sasaran : Angka harapan hidup.
9. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkat, dengan indikator capaian sasaran : Persentase rintisan desa budaya yang aktif.
10. Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat, dengan indikator capaian sasaran : Indeks kualitas lingkungan hidup.
11. Infrastuktur Wilayah Meningkat, dengan indikator capaian sasaran : Indeks infrastuktur wilayah
12. Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat, dengan indikator capaian sasaran : Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah, Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Mergangsan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : “Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Mergangsan”

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan dengan formula pengukuran sebagai berikut: Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 340, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 400.

Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan). Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Mergangsan menetapkan sasaran sebagai berikut : "Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan meningkat"**.** Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan dengan formula pengukuran sebagai berikut : Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan dibagi jumlah kelurahan. Pada awal Renstra nilai sasaran strategis adalah 340, sedangkan target pada akhir Renstra adalah 400.

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Sasaran Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Mergangsan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	**2**	3	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan	340	345	350	390	395	400

2.1.3 Strategi dan Program Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Sedangkan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang tertuang di dalam kerangka perencanaan strategis di Kecamatan Mergangsan adalah dengan menetapkan program kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
   a. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
   b. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
b. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja OPD
4. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan
   a. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mergangsan
   b. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kecamatan Mergangsan
   c. Pembinaan Sosial dan Budaya Kecamatan Mergangsan
   d. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kelurahan Brontokusuman
   e. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kelurahan Keparakan
   f. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kelurahan Wirogunan
   g. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Kecamatan Mergangsan.

Dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sasaran, Program dan Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan Meningkat		
	A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	a. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi b. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	B. Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
	C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja OPD
	D. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan	a. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mergangsan b. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kecamatan Mergangsan c. Pembinaan Sosial dan Budaya Kecamatan Mergangsan

		d. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kelurahan Brontokusuman e. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kelurahan Keparakan f. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kelurahan Wirogunan g. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Kecamatan Mergangsan

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Kecamatan Mergangsan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja (Murni) Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan	350

Pada tahun 2019, Kecamatan Mergangsan melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan karena adanya monitoring dan evaluasi terhadaap kegiatan maupun output kegiataan sehingga harus dilaksanakan Perubahan Indikator Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Mergangsan. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan	350

Mergangsan meningkat		

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2019

Pada Tahun Anggaran 2019 Kecamatan Mergangsan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 5.849.226.728,-. dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.893.969.247,- dan belanja langsung sebesar Rp. 3.955.257.481,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2019 maka anggaran menjadi sebesar Rp. 6.088.420.354,- dengan rincian belanja tidak langsung Rp. 1.967.332.354,- dan belanja langsung sebesar Rp. 4.121.088.000,-.

2.3.1 Target Belanja Kecamatan Mergangsan

Tabel 2.6
Target Belanja Kecamatan Mergangsan
Pada APBD Perubahan Tahun 2019

Uraian	Target
Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.967.332.354,-
Belanja Langsung	Rp. 4.121.088.000,-
Jumlah	Rp. 6.088.420.354,-

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2019 Kecamatan Mergangsan yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

Sasaran	Anggaran	Prosentase (%)
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan	3.123.057.000,-	100%
1) Penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Mergangsan	184.373.000,-	100%
2) Pelayanan, Informasi dan pengaduan masyarakat Kecamatan Mergangsan	57.913.000,-	100%
3) Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan	217.277.000,-	100%
4) Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Brontokusuman	610.216.000,-	100%
5) Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Wirogunan	655.382.000,-	100%
6) Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Keparakan	617.273.000,-	100%

7) Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Mergangsan	780.623.000,-	100%

BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2019

Pada sub bab ini akan disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap perjanjian kinerja, sasaran strategis organisasi sesuai dengan pengukuran kinerja organisasi.

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mergangsan

Misi 1	Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat								
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target						Sumber data
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan	340	345	350	390	395	400	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kelurahan

(Sumber : Review Renstra 2017-2022)

Pengukuran Kinerja dilakukan dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Untuk menginterpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran perangkat daerah digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel VII-C Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 ≥ 100	Sangat Baik
2.	76 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

(Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Kecamatan Mergangsan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Mergangsan Tahun 2019 yang telah disepakati. Penilaian ini

dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

3.2.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Kecamatan Mergangsan mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu :

1. Kemiskinan masyarakat menurun, dengan indikator capaian sasaran : Angka kemiskinan Berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 588 Tahun 2018 Tentang Penetapan Data Penduduk dan Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial Kota Yogyakarta Tahun 2018, maka dapat dilihat jumlah penduduk miskin di Kecamatan Mergangsan yang menjadi dasar pemberian bantuan di Tahun 2019.

Tabel 3.3
Data Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial
Tahun 2018

Kecamatan / Kelurahan	KMS 3	KMS 2	KMS 1	Jumlah
Kecamatan Mergangsan	4.623	1.589	0	6.212
Kelurahan Brontokusuman	1.438	443	0	1.881
Kelurahan Keparakan	1.788	843	0	2.631
Kelurahan Wirogunan	1.397	303	0	1.700

(Sumber : Data dari Dinas Sosial Kota Yogyakarta)

Untuk mengurangi besarnya angka kemiskinan di kecamatan dan kelurahan se Kecamatan Mergangsan kecamatan dan kelurahan melaksanakan kegiatan yang langsung mengintervensi penduduk yang masuk dalam kriteria penduduk miskin (Sumber data dari Dinas Sosial Kota Yogyakarta dan Kantor BPS). Kegiatan yang dilaksanakan mempunyai tujuan untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan bagi penduduk yang masuk kriteria miskin yang pada akhirnya dapat mandiri dan meningkatkan perekonomian keluarga. Pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan juga menggunakan SIM Pemberdayaan yang mana memuat nama dan alamat penduduk miskin wajib ikut dalam pelatihan.

Tabel dibawah menunjukkan jumlah keluarga miskin Tahun 2018 sebagai dasar pemberian bantuan berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 495 Tahun 2017 Tentang Penetapan Data Penduduk dan Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial Kota Yogyakarta Tahun 2017.

Tabel 3.4
Data Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial Kota Yogyakarta
Tahun 2017

Kecamatan / Kelurahan	KMS 3	KMS 2	KMS 1	Jumlah
Kecamatan Mergangsan	4.362	2.436	3	6.801
Kelurahan Brontokusuman	1.326	658	3	1.987
Kelurahan Keparakan	1.451	1.053	0	2.504
Kelurahan Wirogunan	1.585	725	0	2.310

(Sumber : Data dari Dinas Sosial Kota Yogyakarta)

Berdasarkan tabel diatas untuk Tahun 2019 bahwa untuk penduduk KMS 3 Kecamatan Mergangsan mengalami penurunan hanya di Kelurahan Wirogunan, sedangkan untuk penduduk KMS 2 di 3 kelurahan angka nya mengalami penurunan yang signifikan dan pada penduduk KMS 1 juga mengalami penurunan di Kelurahan Brontokusuman. Data diatas yang harus menjadi perhatian dan kerja keras dari semua pihak adalah karena adanya kenaikan di KMS 3 di Tahun 2017 4.362 jiwa menjadi 4.623 jiwa Tahun 2018. Upaya penurunan angka kemiskinan tidak saja menjadi tanggung jawab kecamatan dan kelurahan semata tetapi harus ada sinergitas dan tanggungjawab bersama 5 K, yaitu : Kota, Kampus, Korporasi, Komunitas dan Kampung. Jadi Tahun 2019 bisa ditarik kesimpulan angka kemiskinan di Kecamatan Mergangsan mengalami penurunan dari 2.137 kk (6.801 jiwa) menjadi 1.927 kk (6.212 jiwa).

2. Keberdayaan Masyarakat Meningkat, dengan indikator capaian sasaran : Angka kemiskinan menurun.

   Program dan kegiatan Kecamatan Mergangsan dan Kelurahan Brontokusuman, Kelurahan Keparakan dan Kelurahan Wirogunan dalam upaya intervensi penduduk yang masuk dalam KMS dalam rangka mewujudkan keberdayaan masyarakat, dengan pelatihan ketrampilan yang mudah diterima dan dipahami mereka.

3. Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat, dengan indikator capaian sasaran : Pola pangan harapan

   Pada Tahun 2019, kelurahan se Kecamatan Mergangsan menggunakan keseluruhan Dana Kelurahan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan tersebut

diantaranya, pelatihan lele cendol dan budidaya lorong sayur, yang bertujuan selain untuk meningkatkan gizi masyarakat juga untuk pemenuhan kebutuhan dasar warga. Titik tolak pentingnya dari kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut adalah diharapkan masyarakat memiliki ketahanan pangan sehingga mampu memenuhi kebutuhan yang paling dasar dengan kemampuan sendiri, tidak tergantung pada kondisi pasar. Program Lorong Sayur dan Lele Cendol di Kecamatan Mergangsan juga telah memenuhi target dalam Perjanjian Kinerja Strategis seperti yang disyaratkan oleh Bapak Walikota Yogyakarta dengan basis Kampung, RW dan RT.

4. Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun, dengan indikator capaian sasaran : Indeks ketimpangan pendapatan
5. Pertumbuhan Ekonomi Meningkat, dengan indikator capaian sasaran : Angka pertumbuhan ekonomi
6. Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menurun, dengan indikator capaian sasaran : Angka kriminalitas, Jumlah pelanggaran Perda

   Seperti yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Strategis, bahwa secara rutin Kecamatan Kotagede akan mengadakan penertiban pondokan penataan PKL, penertiban reklame dan IMB. Dengan berjalannya semua kegiatan di seksi ketentaman dan ketertiban dan bantuan dari BKO diharapkan akan mampu menekan angka kriminalitas di Kecamatan Mergangsan. Kegiatan penertiban yang rutin dijalankan juga bertujuan untuk meminimalkan pelanggaran Perda. Kegiatan tersebut juga dilaporkan secara rutin untuk mengetahui sejauh mana penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban di wilayah.
7. Kualitas Pendidikan Meningkat, dengan indikator capaian sasaran : Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah

   Berdasarkan data dari TP UKS Kecamatan Mergangsan bahwa tidak ada anak putus sekolah di wilayah Kecamatan Mergangsan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas pendidikan di Kecamatan Kotagede relatif bagus.
8. Harapan Hidup Masyarakat Meningkat, dengan indikator capaian sasaran : Angka harapan hidup
9. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkat, dengan indikator capaian sasaran : Persentase rintisan desa budaya yang aktif

   Kecamatan Mergangsan mempunyai Kampung Prawirotaman yang berada di Kelurahan Brontokusuman, Kampung Prawirotaman adalah kampung internasional yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta. Masyarakat di Kampung Prawirotaman mayoritas bergerak dalam bidang jasa, homestay, penginapan dan hotel.

Selain Kampung Prawirotaman Kecamatan Mergangsan juga mempunyai Kampung Wisata Dipowinatan, yang memiliki event internasional kenduri masyarakat yang setiap tahun dilaksanakan dan sudah menjadi event pariwisata Kota Yogyakarta.

Hal ini membuktikan bahwa peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya lokal dengan dukungan dari pengiat-pengiat seni dan budaya yang ada di wilayah Kecamatan Mergangsan.

10. Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat, dengan indikator capaian sasaran : Indeks kualitas lingkungan hidup
11. Infrastuktur Wilayah Meningkat, dengan indikator capaian sasaran : Indeks infrastuktur wilayah
12. Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat, dengan indikator capaian sasaran : Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah, Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah

3.2.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Perbandingan target dan relelisasi kinerja Tahun 2019 Kecamatan Mergangsan pada kinerja sasaran dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran

Tujuan	Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan		
Sasaran	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan meningkat		
Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	% Capaian
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan	350	380,67	108,76

Melihat tabel diatas dapat disimpulkan bahwa prosentase capaian kinerja sasaran Kecamatan Mergangsan adalah 108,76 maka masuk pada kriteria penilaian realisasi kinerja dengan nilai peringkat sangat baik. Oleh karena itu kenaikan capaian realisasi kinerja dapat dikatakan bahwa Kecamatan Mergangsan berkinerja dengan optimal karena kualitas capaian kinerja dan tingkat perkembangan kelurahan dalam kategori yang sama yaitu cepat berkembang. Hal ini berdasarkan pada Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Tahun 2019 Kecamatan Mergangsan melakukan review Renstra 2017-2022 untuk target indikator kinerja, dikarenakan capaian kinerja Tahun 2018 untuk sasaran strategis

dan indikator program melampau dari target renstra yang sudah ditetapkan. Untuk sasaran strategis target awal renstra adalah 345, sedangkan capaiannya sebesar 373, sehingga perlu dilakukan Review terhadap target Renstra 2017-2022. Sedangkan untuk capaian kinerja

Tahun 2019 Kecamatan Mergangsan untuk target sasaran strategis adalah 350, dan pencapaian realisasi sasaran strategis adalah 380,67.

Demikian pula Review terhadap target Renstra dilakukan untuk Program Kecamatan Mergangsan yaitu pada Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan dengan indikator program adalah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Untuk capaian realisasi SKM Tahun 2019 adalah 82,59 melampau dari target 82.

Kecamatan Mergangsan untuk Tahun 2019 pada indikator program pada Tingkat Swadaya Masyarakat tidak mencapai target yang telah ditetapkan karena capaian realisasi 32,21% sedangkan target 44%. Penurunan prosentase tidak dapat dikatakan bahwa Kecamatan Mergangsan berkinerja kurang optimal karena untuk capaian kinerja program berdasarkan data dari anggaran yang dikelola LPMK dimana dana swadaya bergantung pada kebutuhan pembangunan masyarakat. (Review Renstra 2017-2022 terlampir).

Selanjutnya capaian kinerja program dapat dilihat pada tabel perbandingan target dan realisasi indikator program sebagai berikut :

Tabel 3.6

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Program

			Tahun 2019		
No	Program/kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	100%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	100%
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capain kinerja dan keuangan	100%	100%	100%

4.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	82	82,59	100,7
		Tingkat Swadaya Masyarakat	44%	32,23%	73,25%

Rumus penghitungan nilai indikator program untuk program eksternal yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan adalah sebagai berikut :

1) Nilai Suvey Kepuasan Masyarakat menggunakan ketentuan perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat Di Pemerintah Kota Yogyakarta. Formulanya adalah Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25. (terlampir)
2) Tingkat Swadaya Masyarakat dihitung dari prosentase jumlah swadaya masyarakat pada dana Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PMK). Formulanya adalah jumlah dana PMK pada LPMK se Kecamatan Mergangsan di bagi jumlah LPMK Kecamatan Mergangsan yang mendapatkan dana PMK dikalikan 100. (Capaian tingkat swadaya masyarakat LPMK terlampir).

Data penunjang tingkat swadaya masyarakat sebagaimana yang dilaporkan dari LPMK se Kecamatan Mergangsan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7

Data Prosentase Tingkat Swadaya Masyarakat Pada Dana PMK Tahun 2019

NO	LPMK	2018			2019		
		Jumlah dana PMK	Jumlah Swadaya	%	Jumlah dana PMK	Jumlah Swadaya	%
1.	LPMK Brontokusuman	109.747.000,-	42.150.000,-	38	129.747.000,-	38.874.000,-	35,00
2.	LPMK Keparakan	112.046.000,-	59.801.200,-	53,3	132.046.000,-	36,588.105,-	38,99
3.	LPMK Wirogunan	119.669.000,-	46.600.000,-	38,94	139.669.000,-	54.459.000,-	53,50
Jumlah rata-rata prosentase dana swadaya terhadap dana PMK				43,50			32,23

Berdasarkan capaian kinerja program pada Tabel 3.4 dan 3.5 prosentase jumlah swadaya masyarakat pada dana PMK diatas, maka dapat diketahui sebagai berikut :

1. Prosentase capaian kinerja terhadap indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2019 adalah 100,7% dengan nilai peringkat kinerja sangat baik.

2. Meskipun capaian kinerja tingkat indikator swadaya masyarakat Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 73,25% tetapi masih berada pada peringkat sedang.

3.2.2 Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2019 dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya

Tabel berikut menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2019 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja sasaran Tahun 2019 dengan Tahun-tahun sebelumnya

Tujuan	Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan					
Sasaran Strategis	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan meningkat					
	Tahun 2018			Tahun 2019		
Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan	345	373	108%	350	380,67	108,76%

Capaian kinerja untuk tahun 2019 tercapai 108% dari target dan capaian Tahun 2019 tercapai 108,76% juga mengalami trend kenaikan, hal ini menunjukan kinerja Kecamatan Mergangsan mengalami peningkatan dan optimal. Hal ini dapat dilihat pada tingkat perkembangan kelurahan se Kecamatan Mergangsan berada pada tataran cepat berkembang baik pada Tahun 2018 dan Tahun 2019.

Capaian kinerja sasaran yang melampau target dikarenakan adanya faktor pendorong adalah yaitu inovasi yang dilaksanakan Kecamatan Mergangsan Tahun 2019 Inovasi Digitgo dan Inovasi Kader Layak Tampil, sehingga saling bersinergitas meningkatkan kinerja.

Tabel 3.9
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1.	2	3	4
1	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan	Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan dibagi jumlah kelurahan

Kinerja sasaran Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan meningkat dengan indikator Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan pada Tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.10

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2018	2019			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2019 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan meningkat	373	350	380,67	108,76	400	95,16

Selanjutnya analisis untuk Indikator Program adalah formulasi perhitungan diambil dari Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dan Tingkat Swadaya Masyarakat.

Untuk memperdalam data terkait perbandingan capaian dan realisasi kinerja program dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Program

No	Program/kegiatan	Indikator	Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capain kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80.65	81,1	114%	82	82,59	100,7%
		Tingkat Swadaya Masyarakat	29.10%	43,5%	206%	44%	32,23,%	73,25%

	Kewilayahan Kecamatan Mergangsan							

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian Indikator Kinerja Program Kecamatan Mergangsan yaitu pada Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan dengan indikator program adalah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Untuk capaian realisasi SKM Tahun 2019 adalah 82,59 melampau dari target 82.

Sedangkan untuk indikator program pada Tingkat Swadaya Masyarakat tidak mencapai target yang telah ditetapkan karena capaian realisasi 32,21% sedangkan target 44%. Penurunan prosentase tidak dapat dikatakan bahwa Kecamatan Mergangsan berkinerja kurang optimal karena untuk capaian kinerja program pada indikator tingkat swadaya masyarakat berdasarkan dari data dari capaian realisasi swadaya masyarakat pada dana PMK yang dikelola oleh LPMK.

Faktor penghambat dari tidak tercapai target yang telah ditetapkan dikarenakan faktor tingkat partisipasi masyarakat yang menurun, koordinasi antar lembaga kemasyaraktan yang ada di kelurahan belum optimal dan lambatnya kaderisasi di lembaga PMK.

3.2.3 Perbandingan target dan realisasi indikator sasaran dengan target jangka menengah dalam Renstra

Apabila dibandingkan melalui kinerja unit pelayanan dan mutu pelayanan dengan tahun sebelumnya diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 3.12

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Sasaran

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Renstra tahun 1	Target Renstra tahun 2	Target Akhir Renstra
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan	350	380,67	340	345	400

Selanjutnya capaian indikator kinerja program dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.13

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program dengan Target Renstra

No	Program	Indikator	Target 2019	Realisasi 2019	Target dalam Renstra tahun	Target Akhir Renstra	Prosentase capaian tahun ini terhadap	Prosentase capaian tahun ini terhadap

					ke-2		target Renstra tahun ke-2	target akhir Renstra
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capain kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	82	82,59	80,65	85	114%	108%
		Tingkat Swadaya Masyarakat	44%	32,23%	29,1%	47%	206,71%	165,6%

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

3.3.1 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Kecamatan Mergangsan pada tahun 2019 ini mencapai capaian kinerja yang baik dalam mencapai target kinerja. Pernyataan tersebut dapat didukung dengan data capaian kinerja sasaran maupun indikator kinerja program yang sudah diuraikan pada bab yang sama.

Dukungan terhadap pernyataan keberhasilan juga dapat dilihat pada program kerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mergangsan untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja Kecamatan Mergangsan yang diuraikan pada Bab 2 laporan ini.

Indikator kinerja sasaran berupa "Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Mergangsan" pada Tahun 2019 ditargetkan 350 sedangkan capaian realisasi dengan formulasi penghitungannya adalah jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan dibagi jumlah kelurahan yang ada, maka diperoleh hasil 380,67 atau dengan capaian 108,76%, oleh karena itu dalam pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra Kecamatan Mergangsan untuk Tahun 2019 dapat melampau hasil sebagaimana yang ditargetkan. Hal itu didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Faktor Internal
   a. Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan

      Dengan berpedoman pada kewengan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA OPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
   b. Kerjasama internal yang baik dan solid

      Kerjasama antar unit atau seksi sangat diperlukan dalam rangka Penguatan integritas dan kerjasama. Pemberian motivasi kerja dalam hal kerjasama bagi para pegawai selalu dilakukan untuk menjaga kualitas kinerja sumber daya manusia yang tersedia. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (pegawai) Kecamatan Mergangsan dijadikan pemicu semangat untuk meningkatkan dedikasi kerja bagi seluruh pegawai untuk dapat mengemban amanah sesuai dengan program kerja yang ada.
   c. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja

      Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja seluruh PPTK harus dilakukan agar pimpinan dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan program kerja dan kendala apa yang dihadapi sehingga segera dapat dicarikan jalan keluar.
   d. Dengan kemajuan teknologi informasi menunjang kinerja OPD untuk mempercepat kinerja dengan harapan program dan kegiatan dapat dengan cepat diakses dan dirasakan oleh masyarakat.
2. Faktor Eksternal
   a. Peran *Public Social Institutions* / Lembaga Sosial Kemasyarakatan

      Peran penting dari Lembaga Sosial Masyarakat yang berperan dalam pembangunan antara lain RT RW, LPMK, TP PKK, Paguyuban Kesenian, Paguyuban PAUD, Kelurahan Siaga, IPSM, Komisi Lansia dan BKM. Keterlibatan lembaga

kemasyarakatan tersebut dimulai dari proses perencanaan kegiatan sampai dengan pelaksanaannya. Hal itu menjadikan program kerja dapat dilaksanakan dengan lancar.

b. *Society Participation* / Partisipasi Masyarakat

Selain dari lembaga masyarakat, partisipasi juga ditunjukan masyarakat secara pribadi artinya tidak mewakili lembaga atau institusi yang ada. Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kegiatan. Apalagi program pemberdayaan masyarakat dimana kegiatan ini ada di kecamatan maupun kelurahan, tanpa partisipasi masyarakat program pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

3.3.2 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Data terkait dengan efisiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan Kecamatan Mergangsan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14
Analisis Efisiensi

No	Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi	Efisiensi
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	809.685.000,-	742.980.877,-	66.704.123,-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	179.025.000,-	147.397.818,-	31.627.181,-
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.321.000,-	9.130.800,-	190.200,-
4.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan	3.123.057.000,-	2.969.516.675,-	153.530.324,-
	a) Penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban	184.373.000,-	169.010.918,-	15.362.082,-
	b) Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan	57.913.000,-	56.737.708,-	1.175.292,-
	c) Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan	217.277.000,-	212.554.588,-	4.722.412,-
	d) Pembinaan ekonomi, Sosial Budaya	610.216.000,-	598.050.400,-	12.165.600,-

	Masyarakat Kelurahan Brontokusuman			
	e) Pembinaan ekonomi, Sosial Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan	655.382.000,-	626.608.000,-	28.774.000,-
	f) Pembinaan ekonomi, Sosial Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan	617.273.000,-	604.545.600,-	12.727.400,-
	g) Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Mergangsan	780.623.000,-	702.009.461,-	78.613.538,-

Berdasarkan data tersebut diatas, analisis efisiensi dapat dijelaskan dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan walaupun tidak seluruhnya merupakan efisiensi terutama pada sebagian kecil kegiatan tetapi tidak berpengaruh besar pada pencapaian tujuan organisasi.

Pada program administrasi perkantoran sisa anggaran yang tidak dimanfaatkan dengan pertimbangan efisiensi dapat dianalisa sebagai berikut :

a. Pengeluaran anggaran berdasarkan kebutuhan riil. Oleh karena itu sisa anggaran tidak dipergunakan oleh karena kebutuhan tercukupi. Contoh dari hal tersebut adalah kebutuhan pembayaran listrik, telepon dan air dikeluarkan sesuai dengan tagihan dan batas pagu yang ada dan masih terdapat sisa anggaran. Pada kegiatan yang lainnya antara lain pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dan lain-lain juga seperti itu. Selain itu pada anggaran penerimaan tamu tentu saja akan direalisasikan sesuai dengan kebutuhan tamu yang hadir (misalnya penerimaan studi banding) sehingga tidak serta merta harus dilaksanakan oleh karena ada ketergantungan dengan pihak lain.
b. Sub-sub anggaran pendukung pencapaian output ada beberapa yang tidak direalisasikan atau sebagian direalisasikan hanya sesuai dengan kebutuhan. Namun demikian hal itu tidak mengganggu pencapaian target. Hal ini dapat dilihat pada Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan.
c. Untuk Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan pada Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan di kegiatan pemeliharaan fisik lingkungan dapat dilihat efisiensi yang baik karena pelaksanaannya melalui lelang di Bagian Layanan Pengadaan (BLP) sehingga mengikuti aturan lelang dari BLP.

3.3.3 Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian perjanjian kinerja

a. Analisis kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja dilihat dari perjanjian kinerja pada tahun 2019, Kecamatan Mergangsan memiliki satu program kerja yaitu program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Mergangsan.

   Sasaran strategis pada perjanjian kinerja adalah Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan meningkat dengan indikator kinerja sasaran adalah Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan. Target kinerja pada tahun 2019 adalah 350 sedangkan berdasarkan pengukuran yang sudah dilakukan sesuai dengan formulasi tercapai target 380,67. Keberhasilan pencapaian target ini ditunjang oleh beberapa hal antara lain:

   - Keterkaitan antar kegiatan sehingga mewujudkan sinergitas dukungan terhadap pencapaian indikator sasaran. Hal itu dapat digambarkan dari kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Mergangsan sebagai kegiatan yang menghasilkan data dukung terhadap pengukuran pencapaian target sasaran dengan kegiatan lain diantaranya adalah kegiatan pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat pada tiga kelurahan yaitu Kelurahan Wirogunan, Kelurahan Keparakan dan Kelurahan Brontokusuman.
   - Selain itu juga dukungan dari kegiatan lainnya pada tingkat Kecamatan Mergangsan yaitu Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan, Kegiatan Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan serta Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan.
   - Adanya Keterbukaan Informasi Publik

     Hal ini akan memberikan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Mergangsan sehingga berpengaruh baik terhadap partisipasi masyarakat yang juga terkait dengan kegiatan yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat.
   - Partisipasi dan Pelibatan warga masyarakat dalam perencanaan

     Keterlibatan warga masyarakat dalam Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan diawali dengan berbagai usulan dalam musrenbang dari RT RW kelurahan dan kecamatan.

Kejelasan kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh kecamatan dan kelurahan serta kejelasan perkiraan pagu anggaran yang dapat digunakan untuk merealisasikan usulan kegiatan dari masyarakat serta kejelasan posisi atau peran Perangkat Daerah dalam hal ini Kecamatan Mergangsan pada pencapaian target Visi dan Misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2017-2022, memberikan harapan besar dan kepastian pelaksanaan berbagai usulan dalam musrenbang sehingga pertisipasi masyarakat semakin baik. Hal itu menjadi faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan program kerja Kecamatan Mergangsan.

b. Analisis kegiatan yang menghambat pencapaian perjanjian kinerja

Melihat analisis yang sudah diuraikan pada huruf a diatas, maka dapat disimpulkan tidak diperoleh gambaran adanya hambatan yang menghambat dalam rangka pencapaian target kinerja Kecamatan Mergangsan. Namun demikian catatan penting yang tidak boleh diabaikan adalah konsistensi sumber daya internal perangkat daerah atau boleh disebut integritas dan komitmen bersama bagi para pelaksana internal (ASN) harus tetap dijaga dan ditingkatkan.

3.4 Akuntabilitas Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada Tahun 2019 sebesar 93,88% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan sebesar 95,08%, sedangkan realisasi untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 91,76%, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar 82,33% dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian KInerja dan Keuangan sebesar 97,96%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per program dan kegiatan maka bisa dilihat penyerapan anggaran terbesar pada Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan di kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman sebesar 98,01%. Sedangkan penyerapan terendah pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebesar 57,75%.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2019 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.15

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2019

No	Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase Realisasi (%)
A.	Belanja Langsung	4.121.088.000,00	3.869.026.170,80	93,88%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	809.685.000,00	739.801.227,-	91,76%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	179.025.000,00	147.397.818,50	82,33%
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.321.000,00	9.130.800,00	97,96%
4.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan	3.123.057.000,00	2.969.516.675,30	95,08%
	a) Penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban	184.373.000,00	169.010.918,00	91,67%
	b) Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan	57.913.000,00	56.737.708,00	97,97%
	c) Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan	217.277.000,00	212.554.588,00	97,83%
	d) Pembinaan ekonomi, Sosial Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman	610.216.000,00	598.050.400,00	98,01%
	e) Pembinaan ekonomi, Sosial Budaya Masyarakat Kelurahan	655.382.000,-	626.608.000,00	95,61%

	Wirogunan			
	f) Pembinaan ekonomi, Sosial Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan	617.273.000,00	604.545.600,00	97,94%
	g) Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Mergangsan	780.623.000,00	702.009.461,00	89,93%
B.	Belanja Tidak Langsung	1.967.332.354,00	1.893.699.044,00	96,26%

Realisasi anggaran berdasarkan tabel di atas yaitu untuk belanja langsung 93,81% dan untuk belanja tidak langsung 96,26% jika diambil nilai rata-rata menjadi 95,03%. (Laporan Fisik Keuangan terlampir)

Untuk Tahun 2019 Dokumen Perjanjian Kinerja untuk Kecamatan Mergangsan ditambah dengan Perjanjian Kinerja Strategis, dalam perkembangan pelaksanaan dari kegiatan yang masuk dalam Perjanjian Kinerja Strategis tersebut sampai dengan triwulan IV Tahun 2019. (Terlampir).

3.5 Inovasi

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tahun 2019 Kecamatan Mergangsan telah menginisiasi inovasi-inovasi dalam rangka untuk menunjang pencapaian kinerja yang optimal, antara lain :

1. Inovasi DIGITGO

   Merupakan inovasi yang memberikan edukasi jurnalistik bagi tokoh masyarakat se Kecamatan Mergangsan supaya melek teknologi informasi. Pepatah mengatakan kuasailah teknologi informasi maka dunia dalam genggaman, oleh sebab itu diharapkan di era serba tehnologi ini pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Mergangsan dapat menguasai dunia.

   Dengan target potensi masyarakat bisa go internasional sehingga dapat membuka mata dunia luar dan menembus batas ruang dan waktu yang pada tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mempunyai dampak pada pengurangan angka kemiskinan di Wilayah Kecamatan Mergangsan.

2. Inovasi Kader Layak Tampil (Kader Pelayanan Akta Catatan Sipil

   Inovasi kader layak tampil dimaksudkan adanya kader-kader di wilayah yang mempunyai komitmen dalam rangka mendukung program dan kegiatan PD kecamatan dan kelurahan se Kecamatan Mergangsan untuk mempercepat pencapaian tujuan bersama.

Konsep Kader Layak Tampil mempunyai maksud dan tujuan untuk memperpendek rentang kendali antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga dapat terwujud pelayanan yang lebih cepat, mudah dan berkualitas untuk pelayanan non perizinan maupun pelayanan perizinan.

3. Replikasi Inovasi Keluar Bersama Daftar Satu Dapat Lima. (Dilaksanakan 14 Kecamatan)
4. Replikasi Pelayanan Akte kematian Daftar satu Dapat Tiga. (Dilaksanakan 14 Kecamatan)
5. Inovasi Perkawinan Daftar Satu Dapat Tiga. (Dilaksanakan 14 Kecamatan)
6. Dengan mengaktifkan kembali kader-kader Dasawisma yang ada di wilayah.

BAB 4
PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Mergangsan pada Tahun Anggaran 2019 merupakan tahun ke-3 dari Rencana Strategis Kecamatan Mergangsan Tahun 2017-2022. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan sinergitas yang baik serta tingkat partisipasi dari semua pihak dan harapannya dapat selalu ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Kecamatan Mergangsan Tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari analisis indikator sasaran Kecamatan Mergangsan maka Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan sebagai tolak ukur adalah Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan. Pada Tahun 2019 dengan target yang ditetapkan 350 capaian kinerja sasaran dapat melampau dari target yaitu 380,67. Sedangkan untuk indikator program adalah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan target 82 capaian kinerja juga melampau dari target yaitu 82,59. Akan tetapi Tahun 2019 untuk tingkat swadaya masyarakat capaian realisasi dibawah dari target. Target untuk indicator program 44%, untuk capaian realisasi 32,23%. Hal ini dikarenakan tingkat swadaya masyarakat pada pelaksanaan dana PMK Brontokusman dan PMK Keparakan tidak mencapai target.
2. Pelaksanaan kinerja Kecamatan Mergangsan yang dilaksanakan tidak lepas dari sinergitas yang solid dari perangkat daerah teknis dan seluruh *stakeholders* yang ada di Kecamatan Mergangsan. Oleh karena itu perlu dipertahankan dan ditingkatkan sinergitas dan kerjasama dengan harapan untuk mencapai kesejahteraan dan tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan Visi dan Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022.
3. Rencana tindak lanjut

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

a. Peningkatan peran unsur PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan petugas urusannya dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pelaporan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan, pencapaian target dan pelaporan.
b. Optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan dan pemecahan persoalan bersama yang dapat menghambat kinerja perangkat daerah.
c. Pembinaan integritas sumber daya manusia dalam mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.
d. Pembinaan, monitoring dan evaluasi perlu ditingkatkan dalam memberikan motivasi bagi *stakeholder* yang ada di wilayah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mergangsan, semoga dapat memberikan gambaran yang memadai tentang kinerja Kecamatan Mergangsan Tahun 2019 dan bermanfaat bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

DAFTAR SUSUNAN PEGAWAI MENURUT JABATAN

UNIT KERJA: KECAMATAN MERGANGSAN

DESEMBER 2019

NO	JABATAN		PEGAWAI YANG ADA			KEBUTUHAN PEGAWAI	SELISIH KEBUTUHAN DENGAN BEZZETING	NAMA	NIP	GOL. RUANG	PENDIDIKAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN SESUAI ANJAB	DIKLAT	KUALIFIKASI KEDIKLATAN SESUAI ANJAB
	LAMA (PER 1 JANUARI 2017)	BARU (KEPWAL NO. 346 THN 2017)	PNS	CPNS	NABAN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
KECAMATAN MERGANGSAN														
1	**CAMAT**	**CAMAT**	0			1	0	**RINI RAHMAWATI, S,STP, M.IP**	19670213 199603 2 001	IV/b	S.2 ILMU PEMERINTAHAN	S2 Manajemen/ S2 Adm. Negara/ S2 Magister Adm. Publik diutamakan dengan latar belakang pendidikan S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Adm. Negara, S1 Komunikasi, S1 Ilmu Politik, S1 Sosiologi, S1 Sosiatri, S1 Hukum	Diklat PIM III 2013	Diklatpim III, Manajemen Pemerintahan Daerah, Manajemen Pembangunan Daerah, Diklat Pelayanan Prima, Diklat Pengadaan Barang/Jasa
2	**Sekretaris Kecamatan**	**Sekretaris Kecamatan**	1			1	0	**LUCIA DANING KRISNAWATI, SIP, M.Si**	19750330 199403 2 001	IV/a	S.2 ILMU PEMERINTAHAN	S2 Manajemen/ S2 Adm. Negara/ S2 Magister Adm. Publik diutamakan dengan latar belakang pendidikan S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Adm. Negara, S1 Komunikasi, S1 Ilmu Politik, S1 Sosiologi, S1 Sosiatri, S1 Hukum	Diklat PIM III 2015	Diklatpim III, Manajemen Pemerintahan Daerah, Manajemen Pembangunan Daerah, Diklat Pelayanan Prima, Diklat Pengadaan Barang/Jasa
3	**Ka. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian**	**Ka. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian**	1			1	0	**NINING NURHAYATI**	196505111989102001	III/c	SLTA/SMA	S1 Sosial Politik, S1 Hukum	ADUM 1999	Diklatpim IV, Kursus Manajemen Kegiatan , Diklat Pelayanan Publik, Manajemen Pembangunan Daerah, Administrasi Kepegawaian, Diklat Pengadaan Barang/Jasa
a)	Pengadministrasi Umum (Pengadministrasi Persuratan dan Pengurus Barang)	Pengadministrasi Umum	0		1	1	0	**TRIS WANTORO**	1682		SMK	SLTA/DI/DII di bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi Perkantoran/ Tata Perkantoran, DIII di bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi Perkantoran/ Tata Perkantoran		Diklat Pelayanan Prima, Kursus Pengelolaan Barang Daerah, Tata Naskah Dinas dan Kearsipan, Administrasi Perkantoran, Komputer, Kursus Simbada
b)	Pengadministrasi Kepegawaian (Pengadministrasi Kepegawaian dan Pemelihara Barang)	Pengadministrasi Kepegawaian	0		1	1	0	**SANTO**	2410		SMU	SLTA/DI/DII di bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi Perkantoran/ Tata Perkantoran , DIII di bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi Perkantoran/ Tata perkantoran		Diklat Pelayanan Prima, Administrasi Kepegawaian, Kursus Pengelolaan Barang Daerah, Tata Naskah Kepegawaian, SIM Kepegawaian, Penilaian Kinerja Pegawai
c)	Pemelihara Kebersihan Kantor	Pramu Kebersihan	1			1	0	**DUWIJO**	197005202009011006	II /C	SLTA	SLTA/ DI/ DII semua bidang		Diklat Pelayanan Prima
d)	Petugas Keamanan	Petugas Keamanan	0		0	6	-6				SMU	SLTA/ DI/ DII semua bidang		Diklat Pelayanan Prima, Diklat Satpam
4	**Ka. Sub Bag. Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**	**Ka. Sub Bag. Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**	1			1	0	**SRI WAHYUNI**	196606091991022001	III/c	D.III PARIWISATA - BINA WISATA	S1 Sosial Politik, S1 Hukum, S1 Ekonomi	ADUM 1998	Diklatpim IV, Kursus Manajemen Kegiatan , Diklat Pelayanan Publik, Manajemen Pembangunan Daerah, Manajemen Pemerintahan, Diklat Pengadaan Barang/Jasa
a)	Bendahara	Bendahara	1			2	-1	**YUSTINA KRISTANTI, SE**	197811202010012012	III/A	S.1 EKONOMI	SLTA di bidang Akuntansi/ Manajemen, DIII di bidang Akuntansi/ Manajemen		SAKD, Kursus Pengelolaan Keuangan, Diklat Pelayanan Publik, SIM Keuangan Daerah
b)	Pengelola SAK (Pengelola SAK dan Pemegang Buku Pengeluaran)	Pengelola Akuntansi	1			1	0	**ABITA KARUNIAWATI**	199403092015022001	II/B	SMK AKUTANSI	SLTA di bidang Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi/ Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika, DIII di bidang Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi/ Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika		SAKD, Kursus Pengelolaan Keuangan, Diklat Pelayanan Publik, SIM Keuangan Daerah

NO	JABATAN		PEGAWAI YANG ADA			KEBUTUHAN PEGAWAI	SELISIH KEBUTUHAN DENGAN BEZZETING	NAMA	NIP	GOL. RUANG	PENDIDIKAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN SESUAI ANJAB	DIKLAT	KUALIFIKASI KEDIKLATAN SESUAI ANJAB
	LAMA (PER 1 JANUARI 2017)	BARU (KEPWAL NO. 346 THN 2017)	PNS	CPNS	NABAN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
c)	Analis Anggaran	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1			1	0	**OKTOVA RUSMAWATI, S.Pd.T**	198210222011012001	III/a	S.I UN. NEGERI YOGYAKARTA TEKNIK 2005	S1/ DIV di bidang Ekonomi Pembangunan/ Akuntansi/ Manajemen , S1/DIV Sospol, S1 Hukum		Dasar-dasar Perencanaan , Penyusunan LAKIP, Diklat Pelayanan Publik, SAKD, Kursus Pengelolaan Keuangan, Diklat Pelayanan Publik, SIM Keuangan Daerah
d)	Verifikator Keuangan	Verifikator Keuangan	1			2	-1	**ENI JUNAIDAH, SE**	19800616 201001 2 012		S.1	SLTA di bidang Akuntasi/ Manajemen/ Administrasi Perkantoran, DIII di bidang Akuntasi/ Manajemen/ Administrasi Perkantoran		Kursus Pengelolaan Keuangan, SIM Keuangan Daerah, SAKD
5	**Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban**	**Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban**	1			1	0	**HERI SARJIYANTO, SE**	197102181992031005	III/c	S.1 EKONOMI	S2 Manajemen/ S2 Adm. Negara/ S2 Magister Adm. Publik/ S2 yang serumpun diutamakan dengan latar belakang pendidikan S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Adm. Negara, S1 Ilmu Politik, S1 Sosiologi, S1 Sosiatri, S1 Hukum, S1 Ekonomi	Diklat PIM IV 2018	Diklatpim IV, Kursus Manajemen Kegiatan , Diklat Pelayanan Publik, Manajemen Pembangunan Daerah, Manajemen Pemerintahan, Diklat Pengadaan Barang/Jasa
a)	Pengelola Administrasi Pemerintahan	**Analis Administrasi Pemerintahan**	0			1	-1					DIII di bidang Manajemen/ Ekonomi/ Ilmu pemerintahan/ Ilmu administrasi/ kebijakan publik		Diklat Teknis Pemerintahan, Administrasi Agraria
b)	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	**Pengelola Keamanan dan Ketertiban**	1			1	0	**ZUKHORI**	19640815 198602 1 006			SLTA semua bidang, DIII di bidang Administrasi Pemerintah/ Sosiologi		Diklat Trantib Umum
6	**Kepala Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan**	**Kepala Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan**	1			1	0	**DEWI GANTINI, S.Sos**	196305181984022001	III/d	S.1 EKONOMI - MANAJEMEN	S2 Manajemen/ S2 Ilmu Hukum/ S2 Adm. Negara/ S2 Magister Adm. Publik/ S2 yang serumpun diutamakan dengan latar belakang pendidikan S1 Komunikasi, S1 Hukum, S1 Sospol, S1 Ekonomi	ADUM 1996	Diklatpim IV, Kursus Manajemen Kegiatan , Manajemen Pembangunan Daerah, Diklat Pelayanan Prima, Diklat Pengadaan Barang/Jasa
a)	Analis Perizinan	**Analis Perizinan**	1			1	0					S1 Administrasi		
b)	Pengelola Perizinan	**Pengelola Perizinan**	1			1	0	**AGUS PURWANTO WIDIYATMOKO, S.Pd**	19820329 201403 1 001	III/b	S1	SLTA di bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi Perkantoran/ Tata Perkantoran/ Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika/ Teknik Bangunan, DIII di bidang Manajemen/ Ekonomi/ Ilmu Pemerintahan/ Ilmu Administrasi/ Kebijakan Publik/ Teknik Sipil		Diklat Pelayanan Prima, Manajemen Konflik, Diklat Komputer & Internet, Administrasi Kependudukan, Administrasi Agraria, Diklat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Administrasi PBB, Diklat teknis Pembangunan, Fasilitator Pembangunan
c)	Operator Data Entry (Operator SIAK)	**Pengelola Sistem Informasi**	0			1	-1					SLTA di bidang Teknik Informatika/ Manajemen Teknik Informatika, DIII Komunikasi/ Teknik Informatika/ Manajemen Teknik Infomatika		Diklat SIAK, Administrasi perkantoran, Diklat Pelayanan Publik, Administrasi Kependudukan
7	**Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan**	**Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan**	1			1	0	**SRI SUWARNI**	196310071985021001	III/d	SMA	S2 Manajemen/ S2 Adm. Negara/ S2 Magister Adm. Publik/ S2 yang serumpun diutamakan dengan latar belakang pendidikan S1 Sospol, S1 Ekonomi, S1 Hukum, S1 Teknik Sipil	ADUM 1995	Diklatpim IV, Kursus Manajemen Kegiatan , Fasilitator Pemberdayaan & Perekonomian, Diklat Pelayanan Prima, Diklat Pengadaan Barang/Jasa

NO	JABATAN		PEGAWAI YANG ADA			KEBUTUHAN PEGAWAI	SELISIH KEBUTUHAN DENGAN BEZZETING	NAMA	NIP	GOL. RUANG	PENDIDIKAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN SESUAI ANJAB	DIKLAT	KUALIFIKASI KEDIKLATAN SESUAI ANJAB
	LAMA (PER 1 JANUARI 2017)	BARU (KEPWAL NO. 346 THN 2017)	PNS	CPNS	NABAN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a)	Analis Pembangunan	**Analis Pembangunan**	0			1	-1					S1/ DIV di bidang Teknik Pembangunan/S1/DIV Sospol, S1 Hukum		Diklat Teknis Pembangunan, Administrasi Agraria, Diklat Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan, Diklat Pelayanan Publik, Diklat Fasilitator Pembangunan
b)	Pengelola Pembangunan Kecamatan	**Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan**	0			1	-1					DIII di bidang Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi/ Ilmu Pemerintahan/ Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika		Diklat Teknis Pembangunan, Administrasi Agraria, Diklat Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan, Diklat Pelayanan Publik, Diklat Fasilitator Pembangunan
c)	Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian	**Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian**	0			2	-2					SLTA di bidang ekonomi, manajemen perkantoran/ administrasi perkantoran/ tata perkantoran , DIII di bidang Ekonomi/ Administrasi Perkantoran		Diklat Pelayanan Publik, Diklat teknis Pembangunan
d)	Pramu Pemakaman	**Pramu Pemakaman**	0			1	-1					SLTA/ DI/ DII semua bidang		Diklat Pelayanan Prima, Administrasi Perkantoran
8	**Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat**	**Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat**	1			1	0	**SULEMAN PIRSON JOKO SUSILO, S.Sos.**	197011121996101001	III/d	S.1 FISIP-ADMINISTRSI NEGARA	S2 Manajemen/ S2 Adm. Negara/ S2 Magister Adm. Publik/ S2 yang serumpun diutamakan dengan latar belakang pendidikan S1 Sospol, S1 Ekonomi, S1 Hukum	ADUM 2000	Diklatpim IV, Kursus Manajemen Kegiatan , Fasilitator Pemberdayaan & Perekonomian, Diklat Pelayanan Prima, Diklat Pengadaan Barang/Jasa
a)	**Analis Pemberdayaan**	**Analis Pemberdayaan Masyarakat**	0			1	-1					DIII di bidang Sosiologi Pedesaan/ Manajemen/ Administrasi		Diklat Pelayanan Prima, Diklat Pemberdayaan Masyarakat
b)	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	**Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan**	0			1	-1					DIII di bidang Sosiologi Pedesaan/ Manajemen/ Administrasi		Diklat Pelayanan Prima, Diklat Pemberdayaan Masyarakat
	Jabatan Fungsional Tertentu													
c)	Penggerak Swadaya Masyarakat	**Penggerak Swadaya Masyarakat**	0			1	-1					SLTA semua bidang, DIII Umum sesuai kualifikasi pendidikan		Diklat Teknis Fungsional
A. KELURAHAN KEPARAKAN														
1	Lurah	Lurah	1			1	0	**RINA BUDI PRASTIWI, SIP, M.Si**	197305181998032007	III/c	S.2 ILMU PEMERINTAHAN	S2 Manajemen/ S2 Adm. Negara/ S2 Magister Adm. Publik/ S2 yang serumpun diutamakan dengan latar belakang pendidikan S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Adm. Negara, S1 Komunikasi, S1 Ilmu Politik, S1 Sosiologi, S1 Sosiatri, S1 Hukum	DIKLAT PIM IV 2017	Diklatpim IV, Manajemen Pemerintahan Daerah, Manajemen Pembangunan Daerah, Kursus Manajemen Kegiatan , Diklat Pelayanan Prima, Diklat Pengadaan Barang/Jasa
2	Sekretaris Kelurahan	Sekretaris Kelurahan	1			1	0	**TRI WIDHAYATI, A.Md**	196402151989032006	III/c	DIII PENDIDIKAN	S1 Sospol, S1 Hukum, S1 Ekonomi, DIII Sospol, DIII Hukum, DIII Ekonomi	ADUM 2000	Diklatpim IV, Manajemen Pemerintahan Daerah, Manajemen Pembangunan Daerah, Kursus Manajemen Kegiatan , Diklat Pelayanan Prima, Diklat Pengadaan Barang/Jasa
a)	Pengadministrasi Umum (Pengadministrasi Persuratan dan Pengurus Barang)	Pengadministrasi Umum	0			2	-2					SLTA/DI/DII di bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi Perkantoran/ Tata Perkantoran, DIII di bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi Perkantoran/ Tata Perkantoran		Diklat Pelayanan Prima, Kursus Pengelolaan Barang Daerah, Tata Naskah Dinas dan Kearsipan, Administrasi Perkantoran, Komputer, Kursus Simbada
b)	Pengadministrasi Keuangan	Pengadministrasi Keuangan	0			1	-1					SMA/SMK/DI/DII Ekonomi, Manajemen Perkantoran/ Administrasi Perkantoran/ Tata Perkantoran, DIII Ekonomi/Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran		SAKD, SIM KEUDA, Kursus Pengelolaan Keuangan

NO	JABATAN		PEGAWAI YANG ADA			KEBUTUHAN PEGAWAI	SELISIH KEBUTUHAN DENGAN BEZZETING	NAMA	NIP	GOL. RUANG	PENDIDIKAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN SESUAI ANJAB	DIKLAT	KUALIFIKASI KEDIKLATAN SESUAI ANJAB
	LAMA (PER 1 JANUARI 2017)	BARU (KEPWAL NO. 346 THN 2017)	PNS	CPNS	NABAN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
c)	Pemelihara Kebersihan Kantor	Pramu Kebersihan	0			1	-1					SMA/SMK		Diklat Pelayanan Prima
d)	Petugas Keamanan	Petugas Keamanan	0			1	-1					SMA/SMK		Diklat Satpam
3	Kepala Seksi Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kepala Seksi Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	1			1	0	**NYOTO RAHARJO**	196303221986021001	III/c	SLTA TEKNIK - BANGUNAN GEDUNG	S1 Hukum, S1 Sospol, S1 Ekonomi, S1 Teknik Sipil, DIII Hukum, DIII Sospol	ADUM 1996	Diklatpim IV, Diklat Pelayanan Prima, Kursus Manajemen Kegiatan , Orientasi Peraturan Per-UU-an Pemda
4	Kepala Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan	Kepala Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan	1			1	0	**SUTIKNO, S.Pd**	197406181996031002	III/c	S1. BAHASA & SENI	S1 Komunikasi, S1 Hukum, S1 Sospol, DIII Komunikasi, DIII Hukum, DIII Sospol		Diklatpim IV, Manajemen Pemerintahan Daerah, Manajemen Pembangunan Daerah, Kursus Manajemen Kegiatan , Diklat Pelayanan Prima, Diklat Pengadaan Barang/Jasa
5	Kepala Seksi Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat	Kepala Seksi Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat	1			1	0	**SARTILAH, SIP**	197711121998032002	III/b	S1 ADMINISTRASI NEGARA	S1 Ekonomi, S1 Sospol, DIII Ekonomi, DIII Sosial Politik		Diklatpim IV, Manajemen Pemerintahan Daerah, Manajemen Pembangunan Daerah, Kursus Manajemen Kegiatan , Diklat Pelayanan Prima, Diklat Pengadaan Barang/Jasa
B. KELURAHAN WIROGUNAN														
1	Lurah	Lurah	1			1	0	**ANASTASIA ERWINA SIWI UTAMI, SIP**	196912131989032002	III/d	S.1 ILMU PEMERINTAHAN	S2 Manajemen/ S2 Adm. Negara/ S2 Magister Adm. Publik/ S2 yang serumpun diutamakan dengan latar belakang pendidikan S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Adm. Negara, S1 Komunikasi, S1 Ilmu Politik, S1 Sosiologi, S1 Sosiatri, S1 Hukum	ADUM 1999	Diklatpim IV, Manajemen Pemerintahan Daerah, Manajemen Pembangunan Daerah, Kursus Manajemen Kegiatan , Diklat Pelayanan Prima, Diklat Pengadaan Barang/Jasa
2	Sekretaris Kelurahan	Sekretaris Kelurahan	1			1	0	**TH ROOS DRIASTUTI**	196404081987032023	III/c	SLTA	S1 Sospol, S1 Hukum, S1 Ekonomi, DIII Sospol, DIII Hukum, DIII Ekonomi	ADUM 1998	Diklatpim IV, Manajemen Pemerintahan Daerah, Manajemen Pembangunan Daerah, Kursus Manajemen Kegiatan , Diklat Pelayanan Prima, Diklat Pengadaan Barang/Jasa
a)	Pengadministrasi Umum (Pengadministrasi Persuratan dan Pengurus Barang)	Pengadministrasi Umum	0			2	-2					SLTA/DI/DII di bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi Perkantoran/ Tata Perkantoran, DIII di bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi Perkantoran/ Tata Perkantoran		Diklat Pelayanan Prima, Kursus Pengelolaan Barang Daerah, Tata Naskah Dinas dan Kearsipan, Administrasi Perkantoran, Komputer, Kursus Simbada
b)	Pengadministrasi Keuangan	Pengadministrasi Keuangan	0			1	-1					SMA/SMK/DI/DII Ekonomi, Manajemen Perkantoran/ Administrasi Perkantoran/ Tata Perkantoran, DIII Ekonomi/Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran		SAKD, SIM KEUDA, Kursus Pengelolaan Keuangan
c)	Pemelihara Kebersihan Kantor	Pramu Kebersihan	0			1	-1					SMA/SMK		Diklat Pelayanan Prima
d)	Petugas Keamanan	Petugas Keamanan	0			1	-1					SMA/SMK		Diklat Satpam
3	Kepala Seksi Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kepala Seksi Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	1			1	0	**MEIYANTO**	196705261992031009	III/c	SLTA	S1 Hukum, S1 Sospol, S1 Ekonomi, S1 Teknik Sipil, DIII Hukum, DIII Sospol	DIKLATPIM IV 2014	Diklatpim IV, Diklat Pelayanan Prima, Kursus Manajemen Kegiatan , Orientasi Peraturan Per-UU-an Pemda
4	Kepala Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan	Kepala Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan	1			1	0	**AMBARIYATI, Amd**	197609302006042002	III/b	D.III ADMINISTRASI NEGARA	S1 Komunikasi, S1 Hukum, S1 Sospol, DIII Komunikasi, DIII Hukum, DIII Sospol		Diklatpim IV, Manajemen Pemerintahan Daerah, Manajemen Pembangunan Daerah, Kursus Manajemen Kegiatan , Diklat Pelayanan Prima, Diklat Pengadaan Barang/Jasa

NO	JABATAN		PEGAWAI YANG ADA			KEBUTUHAN PEGAWAI	SELISIH KEBUTUHAN DENGAN BEZZETING	NAMA	NIP	GOL. RUANG	PENDIDIKAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN SESUAI ANJAB	DIKLAT	KUALIFIKASI KEDIKLATAN SESUAI ANJAB
	LAMA (PER 1 JANUARI 2017)	BARU (KEPWAL NO. 346 THN 2017)	PNS	CPNS	NABAN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Kepala Seksi Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat	Kepala Seksi Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat	1			1	0	**DWI MARDIYANTI**	196503301989032005	III/c	SARMUD PEMERINTAHAN - PEMBANGUNAN MAS	S1 Ekonomi, S1 Sospol, DIII Ekonomi, DIII Sosial Politik	ADUM 2008	Diklatpim IV, Manajemen Pemerintahan Daerah, Manajemen Pembangunan Daerah, Kursus Manajemen Kegiatan , Diklat Pelayanan Prima, Diklat Pengadaan Barang/Jasa
C. KELURAHAN BRONTOKUSUMAN														
1	Lurah	Lurah	1			1	0	**MARYANTO, SE**	197205181992031003	III/d	S.1 EKONOMI	S2 Manajemen/ S2 Adm. Negara/ S2 Magister Adm. Publik/ S2 yang serumpun diutamakan dengan latar belakang pendidikan S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Adm. Negara, S1 Komunikasi, S1 Ilmu Politik, S1 Sosiologi, S1 Sosiatri, S1 Hukum	DIKLATPIM IV 2006	Diklatpim IV, Manajemen Pemerintahan Daerah, Manajemen Pembangunan Daerah, Kursus Manajemen Kegiatan , Diklat Pelayanan Prima, Diklat Pengadaan Barang/Jasa
2	Sekretaris Kelurahan	Sekretaris Kelurahan	1			1	0	**BAIQ SURIYATININGSIH, BA**	196506091986082001	III/c	SARMUD APDN	S1 Sospol, S1 Hukum, S1 Ekonomi, DIII Sospol, DIII Hukum, DIII Ekonomi	ADUM 2000	Diklatpim IV, Manajemen Pemerintahan Daerah, Manajemen Pembangunan Daerah, Kursus Manajemen Kegiatan , Diklat Pelayanan Prima, Diklat Pengadaan Barang/Jasa
a)	Pengadministrasi Umum (Pengadministrasi Persuratan dan Pengurus Barang)	Pengadministrasi Umum	0			2	-2					SLTA/DI/DII di bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi Perkantoran/ Tata Perkantoran, DIII di bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi Perkantoran/ Tata Perkantoran		Diklat Pelayanan Prima, Kursus Pengelolaan Barang Daerah, Tata Naskah Dinas dan Kearsipan, Administrasi Perkantoran, Komputer, Kursus Simbada
b)	Pengadministrasi Keuangan	Pengadministrasi Keuangan	0			1	-1					SMA/SMK/DI/DII Ekonomi, Manajemen Perkantoran/ Administrasi Perkantoran/ Tata Perkantoran, DIII Ekonomi/Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran		SAKD, SIM KEUDA, Kursus Pengelolaan Keuangan
c)	Pemelihara Kebersihan Kantor	Pramu Kebersihan	0		0	1	-1					SMA/SMK		Diklat Pelayanan Prima
d)	Petugas Keamanan	Petugas Keamanan	0			1	-1					SMA/SMK		Diklat Satpam
3	Kepala Seksi Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kepala Seksi Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	1			1	0	**SUTRISTIYANTO**	197305141992031002	III/c	SLTA IPS - A.3	S1 Hukum, S1 Sospol, S1 Ekonomi, S1 Teknik Sipil, DIII Hukum, DIII Sospol	Prajabatan	Diklatpim IV, Diklat Pelayanan Prima, Kursus Manajemen Kegiatan , Orientasi Peraturan Per-UU-an Pemda
4	Kepala Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan	Kepala Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan	1			1	0	**LUSI HERLINA, SH**	197602242006042008	III/d	S1 ILMU HUKUM	S1 Komunikasi, S1 Hukum, S1 Sospol, DIII Komunikasi, DIII Hukum, DIII Sospol	DIKLATPIM IV 2012	Diklatpim IV, Manajemen Pemerintahan Daerah, Manajemen Pembangunan Daerah, Kursus Manajemen Kegiatan , Diklat Pelayanan Prima, Diklat Pengadaan Barang/Jasa
5	Kepala Seksi Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat	Kepala Seksi Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat	1			1	0	**HANDANI BAGUS SETYARSO, S.Sos**	196802222000031001	III/d	S.1 ADMINISTRASI NEGARA	S1 Ekonomi, S1 Sospol, DIII Ekonomi, DIII Sosial Politik	DIKLATPIM 2000	Diklatpim IV, Manajemen Pemerintahan Daerah, Manajemen Pembangunan Daerah, Kursus Manajemen Kegiatan , Diklat Pelayanan Prima, Diklat Pengadaan Barang/Jasa
	JUMLAH		**30**	**0**	**2**	**66**	**34**							

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Mergangsan Tahun 2019 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kecamatan Mergangsan yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Kecamatan Mergangsan Tahun 2017-2022. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Kecamatan Mergangsan yang dihasilkan di Tahun 2019, dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Sasaran yang dijadikan Indikator Kinerja Utama adalah nilai evaluasi perkembangan pembangunan kecamatan, dengan indikator jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan dibagi jumlah kelurahan. Capaian realisasi kinerja adalah 380,67 dengan persentase 108,76%.
b. Sasaran indikator Program Kecamatan Mergangsan ada dua yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan capaian kinerja 82,59 dan Tingkat Swadaya Masyarakat dengan realisasi capaiannya adalah 32.23%.

Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Kecamatan Mergangsan juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan perjanjian kinerja strategis dan melalui inovasi-inovasi yang dikembangkan.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Mergangsan ke depan, sebagai berikut :

1. Penguatan perencanaan kegiatan pada awal penyusunan kegiatan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai upaya untuk pemecahan hambatan yang dapat mempengaruhi jalannya kinerja instansi.
3. Memperkuat koordinasi, kerjasama dan komunikasi internal dan eksternal sehingga terjadi kesepahaman dalam menjalankan tujuan dan sasaran organisasi.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam laporan kinerja instansi pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Kecamatan Mergangsan dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DATA DUKUNG LKjIP PERJANJIAN KINERJA STRATEGIS KECAMATAN MERGANGSAN

NO	SASARAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
1.	Kemiskinan Masyarakat Menurun	Data TKPK Kecamatan, Kelurahan; Intervensi anggaran untuk kemiskinan	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan TKPK Kelurahan sejumlah Rp. 5.600.000 untuk 10 (sepuluh) orang di Kelurahan selama satu tahun diberikan 4 (empat) kali. Rapat Koordinasi tingkat Kecamatan dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun Data TKPK Kota Yogyakarta; KMS Mergangsan : 6.212 Jiwa terdiri dari Kelurahan Keparakan : 2.631 Jiwa, Kelurahan Wirogunan : 1.700 Jiwa dan Kelurahan Brontokusuman : 1.881 Jiwq Dari jumlah 6.212 Jiwa yang sudah diintervensi ada 155 KK,
2.	Keberdayaan Masyarakat Meningkat	Realisasi Indikator Sasaran dan Program Tahun 2019; Faktor Pendorong dan Penghambat tercapainya sasaran dan program	Kecamatan Mergangsan mendukung Misi Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Misi Kesatu yaitu Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat, melalui sasaran strategis yaitu meningkatnya perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan, pada tahun ini ditargetkan 350 terealisasi 379 melampaui target yang telah ditetapkan; Program kerja yang tertera dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan, indikator yang berpengaruh : 1. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat dapat diukur melalui unit pelayanan dan mutu pelayanan dari tahun ke tahun, data

			dimaksud diperoleh dari Survei kepuasan Masyarakat (SKM) dengan kuisioner indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) yang kemudian data tersebut diolah dan diperoleh nilai interval konversi IKM, dari target yang ditetapkan pada Tahun 2019 sebesar 82 terealisasi 82,59, dari hasil tersebut dapat dikatakan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2019 melampaui target 2. Tingkat Swadaya Masyarakat, dapat diukur melalui persentase swadaya masyarakat pada dana Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PMK) dibagi jumlah kelurahan , Dari Target yang ditetapkan Swadaya Masyarakat pada Tahun 2019 adalah 25%, diperoleh realisasi 44,5%. Faktor Pendorong tercapainya sasaran dan program sebagi berikut : 1. Memaksimalkan SDM yang ada untuk bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan 2. Kegiatan pemberdayaan masyarakat baik yang dilaksanakan di kecamatan dan kelurahan dengan melibatkan masyarakat diawali dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaanya, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagi kegiatan yang ada Faktor Penghambat tercapainya sasaran dan program sebagi berikut : Ada beberapa kegiatan internal yang serapan anggarannya/realisasi masih kurang optimal, karena perencanaannya kurang matang.
3	Ketahanan Pangan Masyarakat	Data Kampung Sayur, lele cendol	Pemberdayaan masyarakat dalam budidaya lele cendol di wilayah

	Meningkat		Kecamatan Mergangsan melalui program lele cendol dan lorong sayur/kampung sayur, dengan jumlah sebagai berikut : 1. Lele Cendol ▪ Kelurahan Brontokusuman : RW 9 ▪ Kelurahan Keparakan : RW 11 ▪ Kelurahan Wirogunan : RW 2, RW 4, RW 8, RW 9, RW 12, RW 17 dan RW 18 2. Kampung Sayur Keberadaan Kampung Sayur tersebar di : ▪ Kelurahan Brontokusuman : Kp.Lowanu, Kp.Karangkajen, Kp.Karanganyar ▪ Kelurahan Keparakan : RW 01, RW 03, RW 11 ▪ Kelurahan Wirogunan : RW2, RW 3, RW 4, RW 8, RW 12, RW 17, RW 18, RW 22 dan RW 23
4	Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Miskin	Pelatihan bagi Masyarakat	Intervensi untuk angka kemiskinan dengan menyasar warga yang masuk dalam KMS untuk mendapatkan prioritas mengikuti pelatihan-pelatihan ketrampilan di kecamatan maupun di kelurahan.
5	Pertumbuhan Ekonomi Meningkat	Pelatihan Pariwisata	Pelatihan Manajemen Pariwisata, Pelatihan Barista, Pelatihan Ukir Buah di Kelurahan Brontokusuman Kampung Prawirotaman.
6	Gangguan Ketentraman dan ketertiban Masyarakat Masyarakat Menurun	Forkompimca : kegiatan mendukung keamanan	1. Rakor Forkompimca dilaksanakan 2 (dua) bulan sekali 2. Sambang kampung kecamatan, Polsek, Koramil, BKO PolPP sebanyak 2(dua) kali sebulan dan untuk patroli/sapaan/penegakan Perda setiap hari keliling wilayah. 3. Silaturahmi Kamtibmas dilakukan sebulan 1 kali

			4. Pengajian bulanan dan Safari Jumat dilaksanakan Jumat minggu pertama
7	Kualitas Pendidikan Meningkat	JBM; Kegiatan mendukung pendidikan	Pelaksanaan Jam Belajar Masyarakat telah berjalan di semua RW, telah terbentuk Pokja JBM di masing-masing RW
8	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Data Kelurahan Siaga; Kegiatan mendukung kesehatan	Kegiatan mendukung Kesehatan, diantaranya : ▪ Sinkronisasi program KIA melalui kegiatan Tri Komponen ▪ KIE Bumil terintegrasi Layanan Terpadu Kelahiran ▪ Germas untuk Pengendalian PTM dengan mengembangkan Posyandu dan Posbindu ▪ Penguatan UKBM (KESI, Posyandu, Posbindu) ▪ Peningkatan PHBS --> RW bebas asap rokok Penguatan KESI ▪ Semua RW (60) telah terbentuk RW Siaga ▪ Sudah ada embrio RT Siaga dan Dasawisma siaga di beberapa wilayah
9	Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkat	Kegiatan mendukung kebudayaan	Masyarakat ikut berperan aktif dalam Wayang Jogja Night Carnival (WJNC) HUT Kota Yogyakarta dan Kecamatan Mergangsan meraih Penampil Terbaik dan sutradara terbaik WJNC HUT Kota Yogyakarta 263 Tahun 2019. Masyarakat berperan aktif dalam beberapa event dan mendapat penghargaan seperti : - Juara I Tingkat Kota Yogyakarta Tim Teater Mergangsan - Terbaik II Lomba MC Pranatacara - Harapan I Lomba Fragmen Kelurahan juga mempunyai event unggulan untuk mendukung pelestarian budaya yang dilaksanakan setiap tahunnya seperti :

			▪Kelurahan Keparakan dengan kegiatan Kenduri Kampung Dipowinatan, dilaksanakan dalam rangka memperingati Bulan Muharram/Tahun Baru Islam ▪Kelurahan Brontokusuman mempunyai event internasional Kampung Internasional Prawirotaman dan Bronto Makarya.
11	Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat	Kegiatan meningkatkan kualitas lingkungan	▪ Pembangunan Kampung berwawasan Lingkungan denganKampung Proklim, Lorong Sayur, Kampung Sayur, Penguatan Bank Sampah) ▪ Penataan Kawasan Kumuh ▪ Penataan Bantaran Sungai
12	Infrastruktur Wilayah Meningkat	Kegiatan yang mendukung Infrastuktur	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana wilayah yang sumber pembiayaan berasal dari Dana Kelurahan (DAU sampai dengan triwulan IV Tahun 2019 sudah tercapai 100% dipergunakan untuk : ▪ Belanja Pemeliharaan/Perbaikan Jalan Kampung ▪ Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum; Pemeliharaan SAH
13	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	-	❖ Pegawai Kecamatan Mergangsan mempunyai komitmen bersama bekerja dengan good, clean, clear and akuntabel. Dengan capaian penilaian LKIP A dan SAKIP A ❖ Pegawai Kecamatan Mergangsan mempunyai komitmen bersama SEMANGAT (Selalu Melayani Dengan Hangat) dan BERSAHABAT (Berbudaya, Harmonis, Bermartabat dan Tertib)

1. Struktur Organisasi PD Kecamatan Mergangsan
2. Perencanaan Strategis (Matriks Renstra Lima Tahun sesuai Perwal Nomer 44 Tahun 2019)
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
4. Perubahan Perjanjian Kinerja 2019
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2019
6. Tanggapan / Tindak lanjut Evaluasi LKIP Tahun Sebelumnya
7. Penghargaan yang diterima Tahun 2019
8. Rencana Aksi
9. Ikhtiar laporan hasil evaluasi implementasi SAKIP OPD
10. Review Renstra 2017-2022
11. Laporan Bulanan Keluaran Realisasi Pekerjaan dan Keuangan Kegiatan APBD (Laporan Dinamis)
12. SK Camat Mergangsan Nomer 10 Tahun 2020 Tentang Revisi Penetapan Juara Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kelurahan Tingkat Kecamatan Mergangsan Tahun 2019
13. Hasil Survey Kepuasaan Masyarakat 2019
14. Data Laporan Swadaya Masyarakat pada Dana PMK Kelurahan Brontokusuman Tahun 2019
15. Data Laporan Swadaya Masyarakat pada Dana PMK Kelurahan Keparakan Tahun 2019
16. Data Laporan Swadaya Masyarakat pada Dana PMK Kelurahan Wirogunan Tahun 2019
17. Data Dukung LKIP 2019
18. Revisi SK dan revisi SOP Laporan Data Kinerja
19. Revisi SK dan revisi SOP Tindak Lanjut LHP
20. Hasil analisis jabatan (anjab) Kecamatan Mergangsan

PERENCANAAN STRATEGIS

Cascading Review Renstra April 2019 (Sesuai Perwal No. 44 Tahun 2019)

OPD Utama	Tujuan	Indikator Tujuan	Formula Indikator Tujuan	Target Tujuan		Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD	Formula Indikator Sasaran OPD	Target Sasaran OPD						Program OPD	Indikator Program OPD	Formula Indikator Program OPD	Target Program OPD					
				Awal	Akhir				2017	2018	2019	2020	2021	2022				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
14 Kecamatan	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan	Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan dibagi jumlah kelurahan	340	400	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan	Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan dibagi jumlah kelurahan	340	345	350	390	395	400	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25	70	80,65	82	83	84	85
																Tingkat Swadaya Masyarakat	prosentase jumlah Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi jumlah kelurahan	20 %	29,10 %	44 %	45 %	46 %	47 %

Camat Mergangsan

Budi Santosa, S.STP, M.Si
NIP. 19720615 199201 1 001

Penghargaan Kecamatan Mergangsan
Tahun 2019

NO	PRESTASI YANG DIRAIH	TINGKAT
1.	Peringkat I penampilan Wayang Jogja Night Carnival (WJNC)	Kota Yogyakarta
2.	Sutradara Terbaik WJNC	Kota Yogyakarta
3.	Terbaik I Brebeg Pasar diwakili Kampung Prawirotaman	Kota Yogyakarta
4.	Juara I Lomba Teater Mergangsan Antar Kecamatan	Kota Yogyakarta
5.	Terbaik II Lomba MC Pranatacara	Kota Yogyakarta
6.	Harapan I Lomba Fragmen Antar kecamatan	Kota Yogyakarta
7.	Terbaik II Lomba Posyandu diwakili Kelurahan Wirogunan	Kota Yogyakarta
8.	Terbaik I LBS diwakili Kelurahan Wirogunan, maju ke Tingkat Propinsi DIY	Kota Yogyakarta
9.	Terbaik I PHBS diwakili Kelurahan Wirogunan	Kota Yogyakarta
10.	Terbaik I KKG PKK KKBPK dan Kesehatan diwakili Kelurahan Wirogunan, maju Tingkat Propinsi DIY	Kota Yogyakarta
11.	Terbaik I Lomba Administrasi PKK, diwakili Kelurahan Wirogunan	Kota Yogyakarta
12.	Terbaik I Lomba Bakiak Tandem Putera	Kota Yogyakarta
13.	Meraih Medali Emas Cabor Gate Ball PORDA XV	Kota Yogyakarta
14.	Meraih Medali Emas Drum Band Porda XV	Kota Yogyakarta
15.	Juara III Lomba KWT diwakili Kelurahan Wirogunan	Kota Yogyakarta
16.	Juara II Bola Voli Putera Dandim Cup	Kota Yogyakarta
17.	Lomba Olahraga Tradisional Puteri Tahun	Kota Yogyakarta
18.	Terbaik I Lomba Administrasi PKK, diwakili Kelurahan Wirogunan	Propinsi DIY, Maju Tingkat Nasional
19.	Terbaik I KKG PKK KKBPK dan Kesehatan diwakili Kelurahan Wirogunan, maju Tingkat Propinsi DIY	Propinsi DIY, Maju Tingkat Nasional
20.	Juara II Tim Teater Mergangsan	Propinsi DIY
21.	Pengiring Terbaik I Lomba Teater se-DIY	Propinsi DIY
22.	Juara Karate Junior	Propinsi Jateng
23.	Juara Nasional Karate	Nasional

Review Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Yang Mengacu Pada Tujuan Sasaran dan Program RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun											Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Review Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Target 2017	**Realisasi 2017**	**Target 2018**	**Realisasi 2018**	**Target 2019**	**2020**	**Review Target 2020**	**Target 2021**	**Review Target 2021**	**Target 2022**	**Review Target 2022**		
1.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan	340	340	381	345	373	350	355	390	360	395	365	400	365	400

Sedangkan pada indikator kinerja program terdapat review pada target dari tahun 2018 sampai dengan 2022 sebagai berikut :

No	Program	Indikator	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Review Target	Realisasi 2018	Target 2019	Review Target	Target 2020	Review Target	Target 2021	Review Target	Target 2022	Review Target
1.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	70	80,62	71	80,65	81,1	71	82	73	83	74	84	75	85
		Tingkat Swadaya Masyarakat	20%	29%	21%	29,10%	43,50%	22%	44%	23%	45%	24%	46%	25%	47%

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN MERGANGSAN
JL. Sisingamangaraja No. 55 Yogyakarta Kode Pos 55153 Telp. (0274)388943 Fax. (0274)388943
Email : mg@jogjakota.go.id Email Intranet : mg@intra.jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001, 2740 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT MERGANGSAN

Nomor : 66A/KPTS/XI/2017

TENTANG
REVISI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUMPULAN DATA KINERJA

CAMAT MERGANGSAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memperbaiki acuan bagi OPD Kecamatan Mergangsan untuk mengumpulkan data kinerja dan menyusun laporan kinerja dapat dilaksanakan secara efektif, efesien dan akuntabel perlu dilakukan revisi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP)

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Mergangsan.

Mengingat :

1. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Walikota Nomor . 101 Tahun 2010 tentang Mekanisme Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN CAMAT MERGANGSAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG REVISI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA
KESATU	:	Menetapkan Revisi terhadap Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja di Kecamatan Mergangsan.
KEDUA	:	Standar Operasional Prosedur sebagaimana disebut dalam Diktum KESATU merupakan pedoman pengumpulan data kinerja dan penyusunan laporan kinerja di Kecamatan Mergangsan.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 20 November 2017

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN MERGANGSAN

CAMAT MERGANGSAN

Dra. TYASNING HANDAYANI SHANTI
NIP 196702061994032007

Lampiran : Keputusan Camat Mergangsan
Nomor : 66A Tahun 2017

Tanggal : 20 November 2017

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA **KECAMATAN MERGANGSAN** Jl. Sisingamangaraja No. 55 Yogyakarta Kode Pos 55153 Telp. (0274)388943 Fax. (0274)388943	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	: 2014
	Tanggal Revisi	: 16 November 2017
	Tanggal Efektif	: 20 November 2017
	Disahkan oleh	Camat Mergangsan Dra. TYASNING HANDAYANI SHANTI NIP. 196702061994032007
	Nama SOP	Pengumpulan Data Kinerja

Dasar Hukum:	**Kualifikasi Pelaksana:**
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Peraturan Walikota Nomor . 101 Tahun 2010 tentang Mekanisme Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja	1. Memiliki pengetahuan tentang dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Mergangsan) 2. Memiliki pengetahuan tentang ketugasan seksi di kecamatan khususnya terkait dengan data 3. Memiliki kemampuan melaksanakan koordinasi antar seksi yang ada 4. Memiliki kemampuan untuk pengolahan data sederhana 5. Mengetahui tugas fungsi dan mekanisme pembuatan laporan

6. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2013 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta 7. Keputusan Inspektur Kota Yogyakarta Nomor 60 /KEP/2013 tentang Ruang Lingkup Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD/unit kerja	
Keterkaitan:	**Peralatan / Perlengkapan Kantor:**
1. SOP surat keluar	1. Komputer dengan koneksi internet 2. ATK 3. Printer
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendataan:**
1. Jika SOP pengumpulan data kinerja tidak dilakukan maka Perangkat Daerah tidak dapat menunjukan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan. 2. Perlu akurasi dan updating dalam menghimpun data sehingga dapat diwujudkan validitas dalam pengukuran kinerja	

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Pengadm. Umum	Kasubag Keu. PEP	PPTK	Sekcam	Camat	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Melakukan koordinasi dengan PPTK dalam rangka pengukuran kinerja Kecamatan Mergangsan melalui pencermatan data-data yang dibutuhkan dalam pengukuran kinerja dan koordinasi pengumpulan data kinerja						ATK Rancangan data yang diperlukan	1 jam	1. Kepastian pengumpulan data 2. Kejelasan data yang diperlukan	
2	Melakukan inventarisir terhadap data yang digunakan untuk pengukuran kinerja dan mengumpulkan data kinerja						ATK Komputer Stopmap Printer	3 hari @ 2 jam	Data kinerja	

3	Menerima dan merekap data-data yang telah disampaikan untuk digunakan dalam pengukuran kinerja						ATK Komputer Stopmap Printer Data PPTK	3 hari @ 2 jam	Rekap Data pengukuran kinerja	
5.	Mengolah data-data untuk digunakan dalam pengukuran kinerja dan menyusun konsep Laporan Kinerja						Rekap Data pengukuran kinerja ATK Komputer Stopmap Printer	3 hari @ 2 jam	Konsep Laporan Kinerja	
6.	Mencermati dan mengoreksi laporan data kinerja						Konsep Laporan Kinerja	4 jam	Konsep Laporan kinerja yg telah dicermati	
7.	Mencermati menandatangani laporan data kinerja						Konsep Laporan kinerja yg telah dicermati Sekcam	4 jam	Konsep Laporan kinerja yg telah dicermati / ditanda tangani Camat	
8.	Penggandaan dan pengiriman						Register surat keluar Laporan Data kinerja Alat transportasi	2 jam	Laporan Data kinerja	

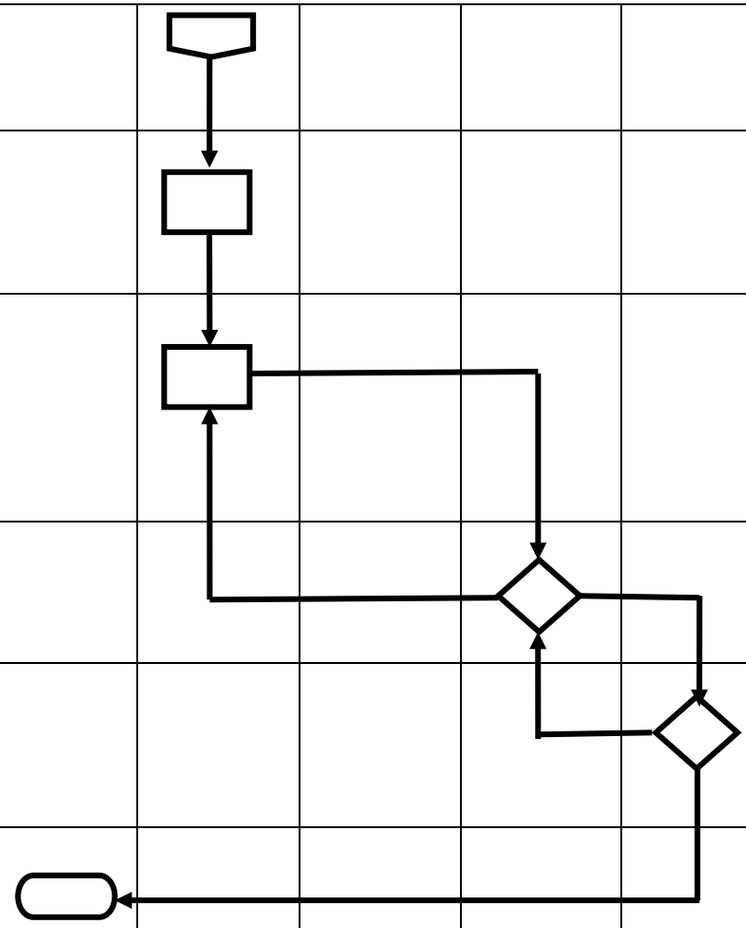

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN MERGANGSAN
JL. Sisingamangaraja No. 55 Yogyakarta Kode Pos 55153 Telp. (0274)388943 Fax. (0274)388943
Email : mg@jogjakota.go.id Email Intranet : mg@intra.jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001, 2740 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT MERGANGSAN

Nomor : 61/KPTS/X/2017

TENTANG
REVISI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

CAMAT MERGANGSAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memperbaiki acuan bagi OPD Kecamatan Mergangsan untuk menindaklajuti hasil pemeriksaan agar dapat dilaksanakan secara efektif, efesien dan akuntabel perlu dilakukan revisi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP)

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Mergangsan.

Mengingat :

1. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pada Pemerintah Kota Yogyakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MERGANGSAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG REVISI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

KESATU : Menetapkan Revisi terhadap Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Kecamatan Mergangsan.

KEDUA	:	Standar Operasional Prosedur sebagaimana disebut dalam Diktum KESATU merupakan pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan di Kecamatan Mergangsan.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 24 Oktober 2017

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN MERGANGSAN

CAMAT MERGANGSAN

Dra. TYASNING HANDAYANI SHANTI
NIP 196702061994032007

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA **KECAMATAN MERGANGSAN** **Jl. Sisingamangaraja 55 Yogyakarta**	Nomor SOP	
	Tgl Pembuatan	Desember 2014
	Tgl. Revisi	24 Oktober 2017
	Tgl. Efektif	24 Oktober 2017
	Disahkan oleh	Camat Mergangsan Dra. TYASNING HANDAYANI SHANTI NIP. 19670206.199403.2.007
	Nama SOP	TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PERSONIL
1. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Peraturan BPK RI No. 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan; 5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pada Pemerintah Kota Yogyakarta	Kualifikai personil sesuai dengan uraian jabatan yang dikeluarkan oleh Bagian Organisasi.

KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP surat masuk 2. SOP surat keluar	Komputer, alat tulis kantor, jamuan sidang, kendaraan, data-data yang dibutuhkan sesuai dengan temuan dalam LHP
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Apabila prosedur ini tidak dilakukan maka temuan dalam pemeriksaan tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya sehingga akan mengakibatkan buruknya administrasi dalam pelaksanaan tugas.	

NO	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket .
		Pengadministrasi Umum	Seksi/Unit kerja	Sekcam	Camat	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Ouput	
1.	Pengadministrasi umum menerima surat / LHP					LHP, Register surat, kartu kendali	5 menit	LHP yang diregister dan dilampiri kartu kendali	
2	Camat menerima, membaca dan memahami Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)					Alat tulis kantor	15 menit	LHP yang sudah dibaca	

3	Camat meneruskan ke Sekcam dan memerintahkan, unit kerja terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi LHP					Alat tulis kantor	5 menit	LHP yg sudah dibaca dan disposisi	
4	Unit kerja terkait menyusun / melaksanakan tindak lanjut sesuai LHP					Alat tulis kantor Data pendukung	2 hari	Pelaksanaan tindak lanjut dan laporan tindaklanjut	
5	Unit Kerja melaporkan tindak lanjut yang telah dilaksanakan kepada Camat melalui Sekcam					Laporan pelaksanaan tindak lanjut	15 menit	Laporan pelaksanaan tindaklanjut yang telah dibaca Sekcam	
6	Sekcam melaporkan pelaksanaan tindak lanjut dari unit kerja kepada camat dan menyusun laporan kepada APIP					Laporan pelaksanaan tindak lanjut	15 menit	Laporan pelaksanaan tindaklanjut yang telah dibaca Camat	
7	Camat memeriksa dokumen tindaklanjut LHP dan menandatangani laporan kepada APIP dan menyerahkan kebali kepada Sekcam					1. Laporan pelaksanaan tindak lanjut 2. ATK	30 menit	Dokumen pelaksanaan tindak lanjut yang ditanda tangani Camat	
8	Laporan tindak lanjut LHP dikirim kepada APIP							Dokumen pelaksanaan tindak lanjut yang siap dikirim	

STRUKTUR KECAMATAN MERGANGSAN

C A M A T
RINI RAHMAWATI, S.IP, M.IP
NIP. 19670213 199603 2 001

SEKRETARIS KECAMATAN
LUCIA DANING KRISNAWATI, S.IP, M.Si
NIP. 19750330 199403 2 001

JABATAN FUNGSIONAL
Penggerak Swadaya Masyarakat

KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
NINING NURHAYATI
NIP. 19650511 198902 001

PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
SANTO
NITB. 2410

PENGADMINISTRASI BARANG
TRIS WANTORO
NITB. 1682

KASUBBAG KEUANGAN DAN PEP
SRI WAHYUNI, A.M.d
NIP. 19660609 1999102 001

ANALIS PERENCANAAN
OKTOVA RUSMAWATI, S.Pd.T
NIP. 19821022 201101 2 001

BENDAHARA PENGELUARAN
YUSTINA KRISTANTI, SE
NIP. 19781120 201001 2 012

VERIFIKATOR
ENI JUNAIDAH, SE
NIP. 19800616 201001 2 012

PENGELOLA AKUNTANSI
ABITA KARUNIAWATI
NIP. 19940309 201502 2 001

PRAMU KEBERSIHAN
DUWIJO
NIP. 19700520 200901 1 006

KA. SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN
HERI SARJIYANTO, SE
NIP. 19710218 199203 1 005

PENGELOLA KEAMANAN DAN KETERTIBAN
ZUKHORI
NIP. 19640815 198602 1 006

KA. SEKSI PELAYANAN, INFORMASI DAN PENGADUAN
DEWI GANTINI, S.Sos
NIP. 19710218 199203 1 005

PENGELOLA PERIZINAN
AGUS PURWANTO WIDIYATMOKO, SP.d
NIP. 19820329 201403 1 001

KA. SEKSI PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN
SRI SUWARNI
NIP. 19720306 199303 2 006

KA. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SULEMAN PIRSON JOKO SUSILO, S.Sos
NIP. 19701112 199601 1 001

KELURAHAN BRONTOKUSUMAN

KELURAHAN KEPARAKAN

KELURAHAN WIROGUNAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN MERGANGSAN
Jalan Sisingamangaraja No. 55 Yogyakarta 55153 Telp/Fax (0274) 3889943
EMAIL : mg@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Yogyakarta, Januari 2020

Kepada

Yth. PLT. Ka. Bappeda Kota Yogyakarta

Di

YOGYAKARTA

SURAT PENGANTAR
Nomor : 130 /

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019.	1 bndl	Dikirim untuk menjadikan periksa.

Sekretaris Kecamatan

LUCIA DANING KRISNAWATI, S.IP, M.Si
NIP. 19750330 1994032 2 001

Yang menerima :

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN MERGANGSAN
Jalan Sisingamangaraja No. 55 Yogyakarta 55153 Telp/Fax (0274) 3889943
EMAIL : mg@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Yogyakarta, 30 Januari 2020

Kepada

Yth. Inspektur Kota Yogyakarta

Di

YOGYAKARTA

SURAT PENGANTAR
Nomor : 130 / 81

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019.	1 bndl	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa.
2.	Berita Acara Validasi LKIP Tahun 2019.	1 lbr	

Sekretaris Kecamatan

LUCIA DANING KRISNAWATI, S.IP, M.Si
NIP. 19750330 1994032 2 001

Yang menerima :

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN MERGANGSAN
Jln. Sisingamangaraja No. 55 Yogyakarta Kode Pos 55153 Telp/Fax. (0274) 388943
EMAIL : mg@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

TANGGAPAN / TINDAK LANJUT EVALUASI LkjIP TAHUN SEBELUMNYA

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Menetapkan Perjanjian Kinerja pada seluruh Eselon IV sebagai *breakdown* atas Perjanjian Kinerja Atasan.	Sudah ditindaklanjuti untuk Anggaran 2019.
2.	Menyempurnakan mekanisme (SOP) pengumpulan data kinerja dengan mempertimbangkan proses jika terjadi kesalahan data.	Sudah dilakukan review SOP Pengumpulan Data Kinerja.
3.	Meningkatkan keandalan informasi kinerja yang disajikan pada laporan kinerja.	Selalu meningkatkan kemampuan dan kompetensi SDM.
4.	Mendokumentasikan proses evaluasi program dan pemantauan rencana aksi dengan memberikan rekomendassi alternatif perbaikan untuk peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan.	Sudah dilaksanakan.

Camat

Rini Rahmawati, S.IP, M.IP
NIP. 19670213 199603 2 001